

Laporan Kinerja

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

2017



KATA PENGANTAR

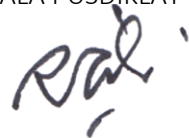
Laporan Kinerja Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) 2017 merupakan wujud pertanggungjawaban dan akuntabilitas kinerja Pusdiklat BPS sebagai penyelenggara negara. Penyusunan Laporan Kinerja tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pusdiklat BPS atas pelaksanaan program dan kegiatan serta pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan laporan ini adalah mengevaluasi capaian kinerja sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2017.

Dalam laporan ini tertuang capaian kinerja terhadap target yang telah ditetapkan pada tahun 2017, perkembangan realisasi kinerja terhadap tahun sebelumnya, serta capaian kinerja terhadap target Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS tahun 2017 dan 2019. Hasil laporan ini diharapkan menjadi masukan bahan evaluasi untuk mencapai kinerja yang lebih optimal pada tahun mendatang.

Pimpinan Pusdiklat BPS mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini. Kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang.

Jakarta, Maret 2018

KEPALA PUSDIKLAT BPS



Drs. Razali Ritonga, MA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i		
Daftar Isi	iii		
Daftar Tabel	v		
Daftar Gambar	vi		
Daftar Lampiran	ix		
Ringkasan Eksekutif	xi		
Bab I	Pendahuluan	1	
	1.1	Latar Belakang	3
	1.2	Maksud dan Tujuan	4
	1.3	Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi	5
	1.4	Sumber Daya Manusia (SDM)	8
	1.5	Potensi dan Permasalahan	10
	1.6	Sistematika Penyajian Laporan	13
Bab II	Perencanaan Kinerja	15	
	2.1	Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019	17
	2.2	Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2017	21
Bab III	Akuntabilitas Kinerja	25	
	3.1	Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017	27
	3.2	Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2016	31
	3.3	Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2017 dan 2019	67
	3.4	Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2017	70
	3.5	Upaya Efisiensi	70
	3.6	Realisasi Anggaran Tahun 2017	72
Bab IV	Penutup	79	
	4.1	Tinjauan Umum	81

4.2	Tindak Lanjut	82
	Lampiran	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019	20
Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017	22
Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator	23
Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2017	28
Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2017	32
Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2017	34
Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 tahun 2017	60
Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2017	64
Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2016 dan 2019	68
Tabel 10. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)	72
Tabel 11. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS TA 2017 (Juta Rupiah)	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS	7
Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan	8
Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan	9
Gambar 4. Nilai Inti BPS	18
Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS	21
Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	37
Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Pelatihan Dasar CPNS Gol. III	38
Gambar 8. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV	39
Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV	41
Gambar 10. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III	42
Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III	43
Gambar 12. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVII	46
Gambar 13. Kunjungan ke BPS RI Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVII	46
Gambar 14. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVIII	47
Gambar 15. Acara Pembukaan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVII	47
Gambar 16. Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Ahli Angkatan XIII	48

Gambar 17.	Kegiatan Pembelajaran di Kelas Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Ahli Angkatan XIII	48
Gambar 18.	Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Diklat Fungsional Pranata Komputer Tk. Terampil Angkatan II	50
Gambar 19.	Foto Bersama Pimpinan BPS Diklat Teknis Penguatan SDM Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Angkatan I	51
Gambar 20.	Foto Bersama Pimpinan BPS Diklat Teknis Penguatan SDM Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Angkatan II	51
Gambar 21.	Pembelajaran di Kelas Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	52
Gambar 22.	Kegiatan <i>Ice Breaking</i> Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV	52
Gambar 23.	Foto Bersama Pimpinan Pusdiklat BPS Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	54
Gambar 24.	Pembelajaran di Kelas Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	54
Gambar 25.	Kegiatan Penutupan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	54
Gambar 26.	Kegiatan Ujian di Lab Komputer Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	54
Gambar 27.	Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2017	57
Gambar 28.	Pembekalan Peserta TB APBN BPS S2 UGM Jurusan Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) Tahun 2017 di Kampus UGM Yogyakarta	60

Gambar 29.	Kuliah Tamu Kepala Pusdiklat kepada Mahasiswa Kelas Kerjasama BPS S2 dan S3 UI Ilmu Ekonomi Tahun 2017 di Kampus UI Depo	61
Gambar 30.	Acara Wisuda Peserta Tugas Belajar S2 UI Ilmu Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017 di Kampus UI Depok	62
Gambar 31.	Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2017	77

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman	
Lampiran 1.	Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019	87
Lampiran 2.	Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019	88
Lampiran 3.	Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2017	89
Lampiran 4.	Pengukuran Capaian Kinerja 2017	92
Lampiran 5.	Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2017	93
Lampiran 6.	Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan: Akhir Tahun 2017	94
Lampiran 7.	Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2017	95
Lampiran 8.	Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun 2017	96
Lampiran 9.	Kalender Diklat Tahun 2017	97

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS disusun sebagai bentuk akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS atas penggunaan anggaran. Laporan Kinerja juga merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, telah ditetapkan 1 (satu) tujuan, 2 (dua) sasaran strategis, dan 7 (tujuh) indikator kinerja yang harus dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019.

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS adalah “Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima”. Tujuan ini diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada tahun 2017, angka capaian kinerja menurut tujuan telah mencapai 96,88 persen. Dengan angka diatas 90 persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2017 cukup memuaskan, meskipun belum semua indikator mencapai hasil yang ditargetkan.

Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Pada tahun 2017, rata-rata capaian indikator sasaran strategis juga telah mencapai angka di atas 90 persen yaitu sebesar 95,43 persen.

Pada sasaran strategis pertama, Pusdiklat BPS selalu berusaha untuk meningkatkan mutu pelayanan diklat aparatur BPS yang prima dibuktikan dengan adanya perbaikan layanan terhadap peserta sehingga peserta dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan widyaiswara/pengajar dengan baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan baik dari sisi teknis dalam proses pembelajaran seperti penyampaian materi oleh

widyaiswara/pengajar maupun non teknis berupa sarana dan prasarana yang tersedia.

Perbaikan layanan yang telah dilakukan berpengaruh terhadap persentase kelulusan peserta diklat. Sejalan dengan itu, capaian kinerja dari indikator “Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan” dan “Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik” telah melampaui target yang ditetapkan dengan nilai berturut-turut adalah sebesar 107,61 persen dan 102,63 persen.

Angka kelulusan tersebut menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing.

Sementara itu, pada indikator “Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus” dan “Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan” sudah sesuai dengan target (100 persen).

Disisi lain, terdapat indikator yang belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini terjadi pada indikator yang berkaitan dengan penguatan SDM untuk mengikuti tugas belajar. Capaian kinerja pada indikator “Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS” hanya mencapai 60,50 persen. Dari target sebanyak 200 pegawai, terealisasi 121 pegawai untuk mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Salah satu faktor penyebab adalah banyaknya jumlah pegawai dari unit kerja asal yang masih menjalani tugas belajar dan belum aktif bekerja. Hal ini mempengaruhi jumlah SDM di unit kerja asal yang diusulkan menjadi calon peserta tugas belajar pada tahun 2017. Untuk mengantisipasi

kekurangan pegawai yang bekerja, terjadi pembatasan calon jumlah peserta tugas belajar dari masing-masing eselon 2.

Untuk mengantisipasi hal ini perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penggalan lebih dalam lagi perlu dilakukan terutama pada proses perencanaan kegiatan tahun yang akan datang, agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

Pada sasaran strategis yang kedua, Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan didukung oleh indikator “Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat” juga telah melebihi dari target yang diharapkan yaitu dengan realisasi 70,27 poin dari target PK 2017 sebesar 70 poin sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 100,39 persen. Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun selalu berupaya memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2017 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler. Penempatan skala prioritas pada kegiatan diklat tersebut untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun. Sementara itu, untuk kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas adalah penyelenggaraan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di BPS. Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, diklat ini diadakan sebanyak 8 (delapan) kelas.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada TA 2017 BPS mendapatkan pagu anggaran sebanyak Rp 63.783,52 juta dengan realisasi sebanyak Rp 53.531,46 juta atau sekitar 83,93

persen. Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 85,06 persen yaitu Rp 37.859,55 juta dari pagu anggaran Rp 44.509,52 juta. Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 78,91 persen yaitu Rp 12.095,31 juta dari pagu anggaran Rp 15.327,23 juta. Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan anggaran sebesar 90,62 persen, yaitu Rp 3.576,60 juta dari pagu anggaran Rp 3.946,76 juta berupa belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi.

BAB I

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik (Pusdiklat BPS) merupakan satuan kerja/perangkat organisasi yang berada di bawah naungan lembaga pemerintah non kementerian yaitu Badan Pusat Statistik (BPS). Pusdiklat BPS adalah unsur pelaksana BPS yang mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPS. Pada Bab X Pasal 393 disebutkan bahwa Pusdiklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan, serta teknis dan fungsional.

Selain itu, Pusdiklat BPS juga menyelenggarakan tugas belajar dan mengelola izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan BPS. Sebagai unsur pelaksana di bidang pendidikan dan pelatihan (diklat), Pusdiklat BPS berperan penting dan mempunyai aspek strategis dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Negara dalam hal ini pegawai di lingkungan BPS dan pada diklat tertentu juga ikut serta meningkatkan kualitas SDM pegawai di luar lingkungan BPS.

Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, terdapat tujuan yang harus dicapai pada tahun 2017 sebagaimana tertuang dalam Renstra Pusdiklat BPS Tahun 2015-2019, yaitu “Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima”. Untuk mempermudah pencapaian tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai pada tahun 2017.

Dari setiap indikator tujuan dan sasaran, Pusdiklat BPS menetapkan target kinerja sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) di awal

tahun 2017. Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara wajib menyusun laporan kinerja tahunan pada akhir tahun anggaran. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan.

Laporan Kinerja tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang dapat menggambarkan keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, terutama untuk melihat keberhasilan aspek strategis melalui tingginya capaian kinerja yang telah diraih. Laporan ini, selain sebagai pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam rangka mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*), juga digunakan sebagai evaluasi atau upaya perbaikan berkesinambungan dalam meningkatkan kinerjanya untuk tahun yang akan datang.

Pedoman dalam menyusun Laporan Kinerja bagi setiap instansi pemerintah tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Pusdiklat BPS kepada Kepala BPS atas pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan anggaran dan

barang milik Negara dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan. Sedangkan tujuan penyusunan adalah untuk mengevaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran Pusdiklat BPS selama tahun 2017.

1.3. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2008 tentang Badan Pusat Statistik yang dijabarkan dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala BPS Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi, maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Pusdiklat BPS adalah sebagai berikut:

1. Kedudukan

Pusdiklat merupakan unit kerja setingkat Eselon II pada BPS yang berlokasi di Jalan Raya Jagakarsa No. 70. Jakarta Selatan 12620.

2. Tugas

Pusdiklat mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud di atas, pusdiklat menyelenggarakan fungsi:

a. Pelaksanaan urusan tata usaha

b. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan

c. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

4. Susunan Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, struktur organisasi Pusdiklat adalah sebagai berikut:

1. Kepala

Kepala Pusdiklat BPS adalah pejabat Eselon IIa

2. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bagian Tata Usaha yang membawahi dua Kepala Subbagian setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha Umum; dan
- b. Subbagian Rumah Tangga

3. Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan

Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan dan Kepemimpinan

4. Bidang Diklat Teknis dan Fungsional

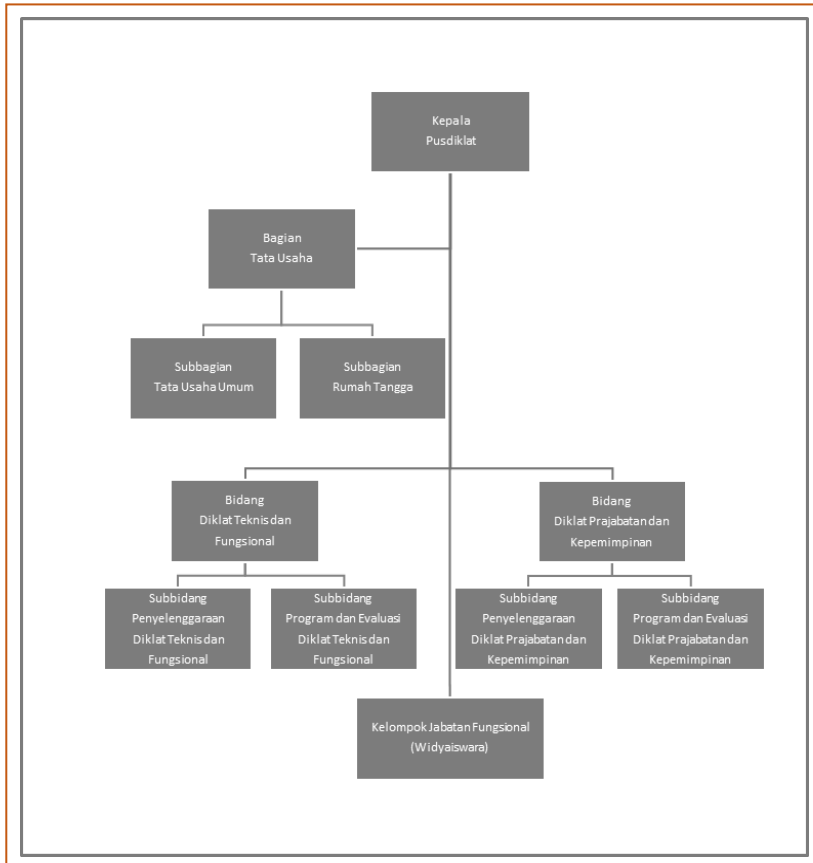
Bidang ini dipimpin oleh seorang pejabat Eselon IIIa, yaitu Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional yang membawahi dua Kepala Subbidang setingkat Eselon IVa yaitu:

- a. Subbidang Penyusunan Program dan Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional; dan
- b. Subbidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional yaitu Jabatan Fungsional Widyaiswara.

Bagan Struktur Organisasi Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 1.

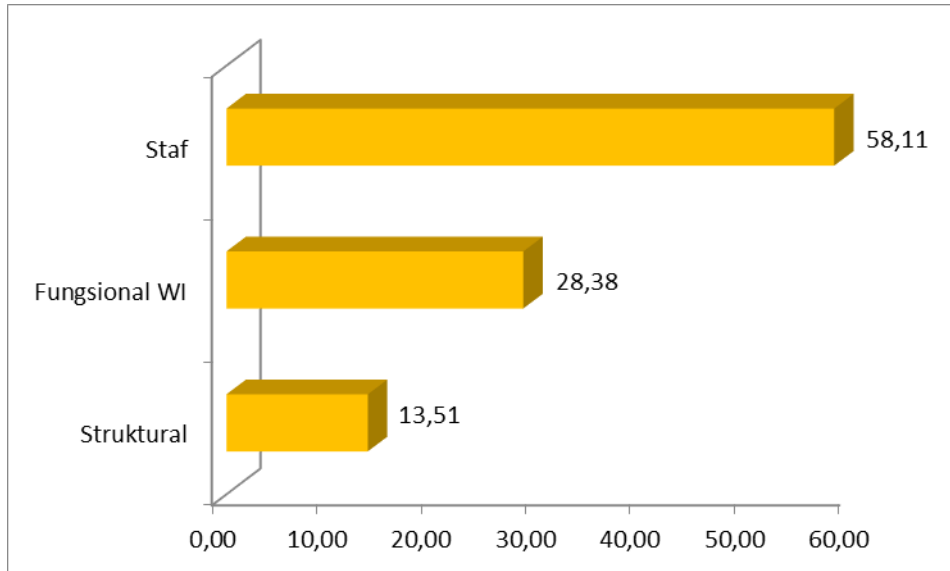


Gambar 1. Struktur Organisasi Pusdiklat BPS

1.4. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada akhir tahun 2017, SDM Pusdiklat BPS seluruhnya berjumlah 74 pegawai yang terdiri dari 13,51 persen adalah pegawai pejabat struktural, 28,38 persen adalah pegawai pejabat fungsional widyaiswara, dan 58,11 persen pegawai adalah staf (Gambar 2). Masing-masing jabatan

tersebut mempunyai peran yang sangat penting untuk pengembangan diklat yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

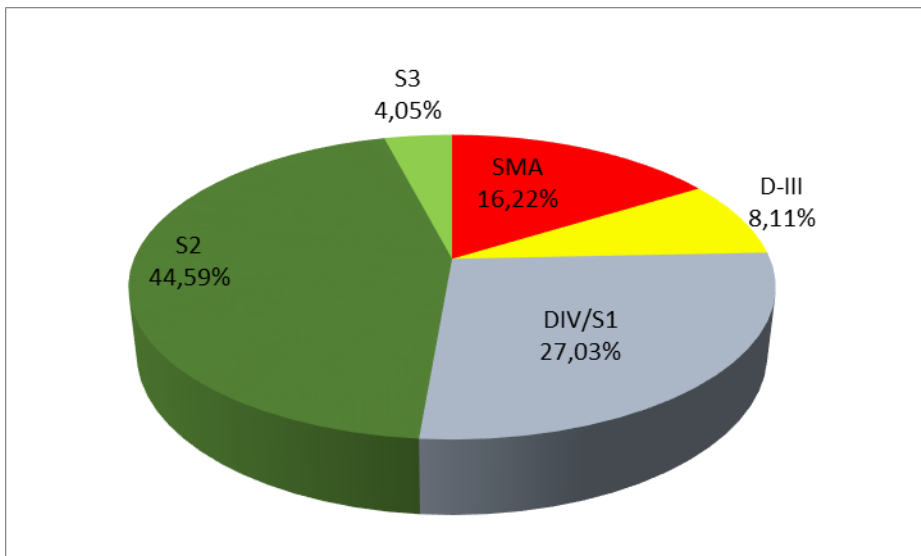


Gambar 2. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Jabatan

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat tidak terlepas dari peranan para pengajar diklat. Pejabat fungsional widyaiswara merupakan SDM Pusdiklat BPS yang berperan sebagai tenaga pengajar diklat. Fungsional widyaiswara di Pusdiklat BPS berjumlah 21 orang terdiri dari 11 orang Fungsional Muda dan 10 orang Fungsional Madya. Semakin berkembangnya diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat BPS, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pegawai BPS yang secara tidak langsung juga mendukung data BPS yang lebih berkualitas.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat BPS, dibutuhkan SDM yang berkualitas. Salah satu unsur yang secara tidak langsung berperan dalam peningkatan kualitas SDM adalah tingkat pendidikan. Berdasarkan Gambar 3 diperoleh gambaran bahwa pada tahun 2017 komposisi SDM terbesar berada pada tingkat

pendidikan S2, yaitu mencapai 44,59 persen. Bahkan jika dilihat komposisi SDM dengan minimal pendidikan D-IV/S1 telah mencapai 75,68 persen dari total keseluruhan pegawai. Hal ini menggambarkan bahwa secara umum SDM Pusdiklat BPS telah mencerminkan kualitas yang cukup baik sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian kinerja ke arah yang lebih baik.



Gambar 3. Komposisi SDM Pusdiklat BPS menurut Tingkat Pendidikan

1.5. Potensi dan Permasalahan

Dalam rangka mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima, Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat mempunyai peran dan tanggung jawab yang sangat besar untuk lebih meningkatkan pelayanan, baik dari sisi peningkatan kualitas SDM maupun peningkatan materi diklat yang beragam sesuai dengan yang dibutuhkan BPS.

Dalam rangka menghadapi tantangan Pusdiklat untuk lebih meningkatkan pelayanan, banyak kendala/permasalahan yang dihadapi baik dari sisi Pusdiklat sebagai penyelenggara diklat maupun dari sisi peserta dan aturan-aturan yang diterapkan dari pihak LAN RI.

Salah satu permasalahan yang ada adalah pada tahun 2017, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mewajibkan lembaga diklat yang akan melaksanakan Diklat Prajabatan bagi para CPNS menggunakan pola pembaharuan berdasarkan Perka LAN nomor 21 tahun 2016 dengan nama Pelatihan Dasar (Latsar). Untuk mempersiapkan kegiatan tersebut, Pusdiklat BPS sudah menyelenggarakan *Training of Facilitators (ToF)* pada akhir 2016 sebelumnya yang diikuti oleh Widyaiswara, pejabat struktural, dan staf senior baik dari Pusdiklat BPS maupun Biro Kepegawaian BPS. Dengan demikian, untuk tenaga fasilitator baik pengajar, pembimbing dan penguji, Pusdiklat sudah dapat memenuhi kebutuhan dalam melaksanakan Latsar sebanyak 12 angkatan (436 peserta).

Permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan latsar adalah pada pola baru tersebut, peserta diwajibkan untuk menyusun, menginventarisir permasalahan yang ada di unit kerja terkait dengan pelaksanaan tugas. Sementara masa tugas peserta di unit kerja baru beberapa minggu saja yang tentunya belum mengetahui permasalahan yang ada di unit kerja terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu pada tahun berikutnya, pelaksanaan latsar diharapkan diselenggarakan setelah peserta menjalankan tugas di unit kerja penempatan 4-5 bulan.

Pada pelaksanaan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat IV dan III dengan Pola Baru, mewajibkan peserta membuat dan mengimplentasikan Proyek Perubahan (PP). Implementasi PP dari Inovasi yang dibuat peserta dilaksanakan di tempat tugasnya selama kurang lebih 2 bulan. Permasalahan muncul manakala peserta yang sedang

mengimplementasikan PP tersebut harus mengalami mutasi karena kebutuhan organisasi, sehingga menjadi kendala yang sangat mengganggu dalam keberhasilan peserta diklat dalam mengimplementasikan PPnya. Untuk itu diharapkan pada masa yang akan datang dilakukan koordinasi yang kuat antara Pusdiklat, Biro Kepegawaian dan Unit Kerja peserta Diklat agar tidak dilakukan mutasi bagi pejabat yang sedang mengikuti Diklat Kepemimpinan.

Berdasarkan data nominasi peserta Diklatpim Tingkat IV, jumlah pegawai yang belum mengikuti Diklat sekitar 500-an orang, namun karena ketersediaan tempat dan anggaran, pada tahun 2017 ini Pusdiklat BPS hanya bisa menyelenggarakan sebanyak 5 angkatan (167 orang). Diharapkan di tahun berikutnya BPS bisa menyelenggarakan Diklatpim Tingkat IV melalui pola kerjasama dengan BPS daerah atau lembaga diklat di daerah sehingga pegawai BPS yang belum mengikuti menjadi semakin berkurang, mengingat setiap tahunnya jumlah pegawai yang dilantik menjadi pejabat eselon IV atau pengawas selalu bertambah.

Sejalan dengan semakin beragam kebutuhan diklat, terutama diklat teknis dan fungsional, dibutuhkan tenaga pengajar/widyaiswara yang sesuai dengan kompetensinya, hal ini menjadi salah satu kendala yang dihadapi. Selain itu, Pusdiklat juga harus menerapkan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan dengan pola baru yang diatur oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kendala yang dihadapi adalah kurangnya widyaiswara dengan kompetensi pola baru tersebut. Untuk mengatasi kendala diatas telah dilakukan peningkatan kualifikasi dan kompetensi para pengajar melalui berbagai diklat, tugas belajar dan Diklat Training of Trainers (TOT) Substansi Kewidyaiswaraan Pim III dan IV kerjasama Pusdiklat BPS dan LAN RI. Dengan telah diselenggarakannya TOF Latsar pada akhir tahun 2016 dan TOT Substansi DiklatPim IV pada bulan oktober 2017 yang diikuti oleh seluruh Widyaiswara dan pejabat

struktural, maka ini menjadi potensi yang unggul dalam meningkatkan kompetensi Widyaiswara dan Penyelenggara LATSAR dan DIKLATPIM IV dan III.

Di sisi lain, dalam menghadapi tantangan meningkatkan pelayanan diklat dibutuhkan sarana dan prasarana gedung yang memadai baik untuk ruang kelas maupun kamar asrama yang saat ini kapasitasnya masih terbatas. Untuk sarana dan prasarana utama dalam proses pembelajaran ditemui beberapa kendala terkait dengan keterbatasan *microfon*, idealnya dalam satu kelas minimal ada 2 *microfon* agar memperlancar proses interaksi antara fasilitator dan peserta, namun di beberapa kelas hanya tersedia 1 *microfon* sehingga proses interaksi menjadi terhambat. Demikian pula dengan kualitas *LCD* yang sudah perlu dilakukan perbaikan, sehingga penampilan materi yang ditayangkan menjadi kurang jelas untuk dibaca oleh peserta. Pada proses belajar mengajar sering pula materi yang diberikan berupa tayangan video, namun demikian suara dari video kurang bagus diterima oleh peserta dikarenakan *sound system* yang sudah kurang optimal fungsinya. Ketersediaan printer yang terbatas juga menjadi kendala buat peserta diklat, manakala harus mencetak tugas-tugas peserta secara bersamaan dalam waktu yang terbatas. Namun demikian Pusdiklat telah memiliki sarana dan prasarana pendukung kediklatan berupa fasilitas Karaoke, Fitness dan lapangan olah raga untuk selalu menjaga kebugaran peserta baik secara fisik maupun mental.

Sementara itu, kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Teknis dan Fungsional adalah sebagai berikut:

1. Diklat Fungsional Pranata Komputer, terdapat kendala kurangnya peminat diklat prakom di lingkungan BPS sendiri dibandingkan dengan kementerian/lembaga/instansi lain. Sehingga target kuota peserta diklat tidak tercapai.

2. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terdapat kendala batas waktu antara pendaftaran pelatihan dan ujian *on-line* terlalu pendek yaitu 2 minggu dan aplikasi pendaftaran dari LKPP kurang mudah dipahami, selain itu calon peserta diklat dari BPS Provinsi banyak mengalami pergantian. Antisipasi yang dilakukan adalah menunjuk salah satu staf sebagai PIC dalam melakukan pendaftaran *on-line*.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

Mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan kinerja Pusdiklat BPS tahun 2017 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I. **Pendahuluan**, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan susunan organisasi; sumberdaya manusia (SDM); potensi dan permasalahan; serta sistematika penyajian laporan.
- Bab II. **Perencanaan Kinerja**, pada bab ini berisi Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS 2017.
- Bab III. **Akuntabilitas Kinerja**, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Pusdiklat BPS 2017; Capaian Kinerja Pusdiklat BPS terhadap Target Renstra 2017 dan 2019; Upaya Efisiensi Pusdiklat BPS 2017; dan Realisasi Anggaran tahun 2017.
- Bab IV. **Penutup**, pada bab ini berisi tinjauan umum dan tindak lanjut perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

Berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2015-2019, Pusdiklat BPS menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) bidang Statistik.

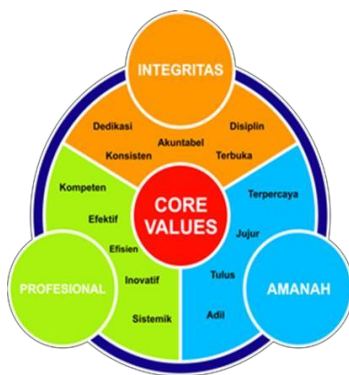
Tahun 2017 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat BPS 2015-2019. Renstra tersebut dijadikan sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja seluruh aparat Pusdiklat BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan statistik, utamanya dalam hal pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Sejalan dengan tugas dan fungsinya sebagai instansi yang menyelenggarakan diklat, Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019 memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang berkontribusi untuk pengembangan SDM. Visi yang disusun Pusdiklat BPS untuk mewujudkan kontribusi tersebut sebagaimana tercantum dalam Renstra 2015-2019 adalah:

“Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”

Visi Pusdiklat BPS tersebut sejalan dengan arah pembangunan BPS sebagaimana termuat dalam Renstra BPS 2015-2019 dengan visi “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua” dan sesuai dengan misi BPS untuk menyediakan data statistik yang berkualitas, memperkuat Sistem Statistik Nasional (SSN) yang berkesinambungan, dan membangun insan statistik yang profesional, berintegritas, dan amanah.

Pengejawantahan nilai-nilai organisasi Badan Pusat Statistik, yakni profesional, berintegritas dan amanah (PIA) menjadi sangat penting diwujudkan dalam rangka pembangunan bidang SDM.



Gambar 4. Nilai Inti BPS

➤ Profesional

“Dalam menyelenggarakan kegiatan statistik, insan statistik yang harus memiliki kapasitas dan kapabilitas yang diperlukan untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas”.

➤ Integritas

“Insan statistik yang menyelenggarakan kegiatan statistik harus memiliki integritas yaitu memiliki sikap dan perilaku dalam melaksanakan profesi/tugasnya seperti dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap profesi yang diemban), disiplin (melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan), konsisten (satunya kata dengan perbuatan), terbuka (menghargai ide, saran, pendapat, masukan, dan kritik-kritik dari berbagai pihak), dan akuntabel (bertanggung jawab dan setiap langkahnya terukur)”.

➤ Amanah

“Amanah merujuk kepada sikap yang selalu mengedepankan kejujuran di dalam melaksanakan kegiatan statistik”

Dengan Visi Pusdiklat BPS 2015-2019, eksistensi Pusdiklat BPS sebagai pusat pendidikan dan pelatihan statistik menjadi semakin penting, karena sangat berperan dalam pembangunan bidang SDM guna menunjang upaya BPS meningkatkan penyediaan data yang berkualitas. Selain itu, visi Pusdiklat BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dan berperan aktif di bidang statistik melalui keikutsertaan aparaturnya dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Pusdiklat BPS.

Visi tersebut dicapai dengan misi sebagai berikut :

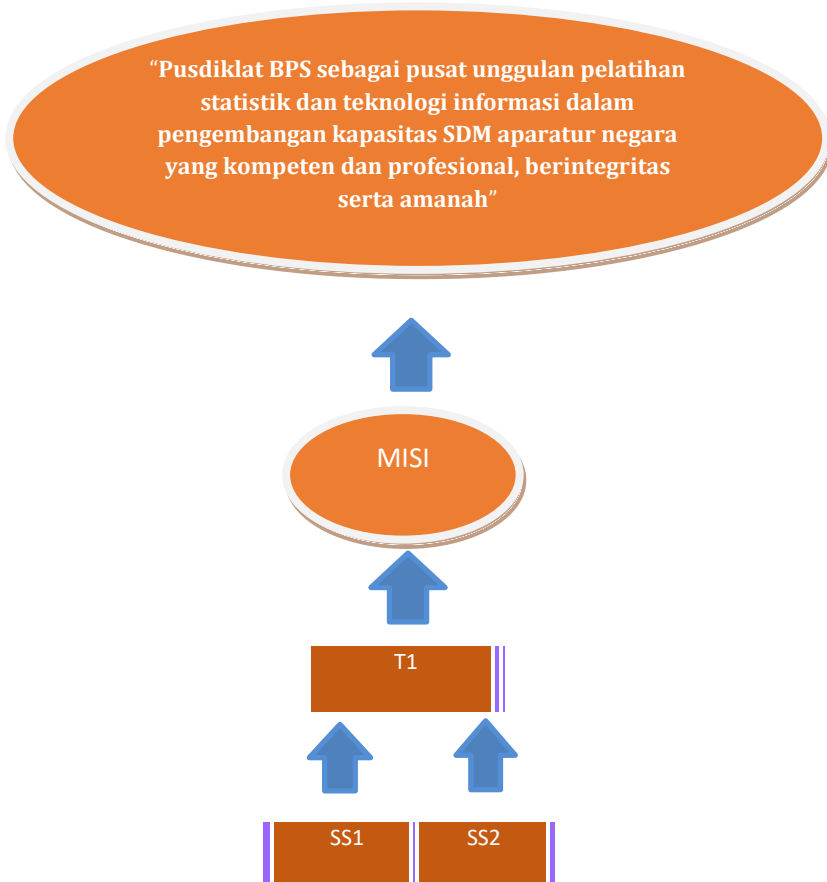
1. Mengembangkan dan menyempurnakan sistem, kurikulum, silabi, modul pembelajaran yang berorientasi pada upaya peningkatan penguasaan statistik dan teknologi komputasi yang berbasis kompetensi sesuai standar statistik internasional.
2. Meningkatkan kualitas SDM melalui penyelenggaraan dan pengembangan program pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memiliki kualitas akademik secara profesional yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks.
3. Meningkatkan kualitas tenaga pengajar serta pengelola pendidikan dan pelatihan serta tenaga kediklatan lainnya dalam rangka meningkatkan kinerja statistik.
4. Menyempurnakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan statistik dan komputasi yang memadai.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pusdiklat BPS 2015-2019, maka ditetapkan tujuan yang harus dicapai. Pada tahun 2017, terdapat perbedaan tujuan dan sasaran strategis sehingga dibuat Review Renstra 2015-2019. Berdasarkan Review Renstra tersebut, tujuan dan sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS
<p>T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima</p>	<p>SS1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima</p>
	<p>SS2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan</p>

Berdasarkan Tabel 1 diatas, Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan dan dua sasaran strategis yang masing-masing memiliki indikator yang terukur sehingga dapat diketahui sejauh mana tingkat pencapaian kerjanya. Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat BPS dapat dilihat pada gambar 5 berikut:



Gambar 5. Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Pusdiklat BPS

2.2. Perjanjian Kinerja (PK) Pusdiklat BPS Tahun 2017

Pada awal tahun ditetapkan target dari masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai selama setahun. Target yang telah ditetapkan menjadi acuan capaian atau realisasi kinerja instansi. Penetapan target tersebut tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Target Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00
	Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00
	Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00
	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00
	Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	200
Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70



Di dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS, target yang ditetapkan berasal dari beberapa indikator kinerja yang dapat mewakili hasil kinerja dari masing-masing sasaran strategis. Realisasi dari target perjanjian kinerja tersebut akan dimonitor setiap triwulanan, kemudian dilaporkan menjadi laporan interim (triwulanan) dan pada akhir tahun dilaporkan menjadi laporan kinerja.

Perjanjian Kinerja yang disusun selanjutnya diturunkan ke dalam perjanjian kinerja pada tingkat unit kerja Eselon III dan Eselon IV. Karena itu setiap unit kerja mempunyai kontribusi terhadap penyusunan target kinerja Pusdiklat BPS. Peranan unit kerja Eselon III pada setiap penyusunan target indikator dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kontribusi Unit Kerja Terhadap Penyusunan Target Indikator

Sasaran/Indikator	Bagian Tata Usaha	Bidang DPK	Bidang DTF
(1)	(2)	(3)	(4)
Sasaran Strategis 1. Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima			
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	★	★	★
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	★	★	★
Persentase peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	★	★	★
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	★	★	★
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	★		

Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	★		
Sasaran Strategis 2. Terwujudnya Pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan			
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	★	★	★

Keterangan:  : Penanggung Jawab  : Kontributor

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA





AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017

Berdasarkan pencapaian dari indikator-indikator kinerja sasaran strategis selama tahun 2017, diperoleh capaian kinerja Pusdiklat BPS tahun 2017. Pengukuran capaian kinerja dihitung berdasarkan perbandingan antara realisasi dengan target indikator kinerja pada masing-masing sasaran. Indikator kinerja yang dimaksud merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang memiliki target pada Perjanjian Kinerja 2017 dan data realisasinya dapat diperoleh sesuai kegiatan yang dilakukan.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pusdiklat BPS. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, begitu pula sebaliknya.

Capaian Kinerja Tujuan

Pusdiklat BPS mempunyai satu tujuan capaian kinerja yaitu **“Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima”**, diukur dengan satu indikator yaitu Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Tujuan tersebut dicapai dengan dua sasaran strategis, yaitu: (1) Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima (2) Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan. Capaian kinerja dari indikator yang mengukur tujuan dan sasaran strategis tersebut dapat dilihat pada tabel 4 di bawah.

Tabel 4. Rata-rata Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Menurut Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2017

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(2)		(4)	(3)	(4)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33	96,88	96,88
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00	99,00	107,61
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	97,50	102,63
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00	80,00	100,00
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33	89,45	96,88
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	200	121	60,50
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,27	100,39
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				95,43

Berdasarkan tabel 4 di atas, tujuan “Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima” relatif tercapai dengan tingkat capaian sebesar 96,88 persen. Dengan angka diatas 90

persen, hal ini menggambarkan bahwa secara umum kinerja Pusdiklat BPS tahun 2017 cukup memuaskan, meskipun belum semua indikator mencapai hasil yang ditargetkan. Begitu pula bila dilihat dari rata-rata capaian indikator sasaran strategis, telah menghasilkan angka rata-rata di atas 90 persen yaitu sebesar 95,43 persen. Jika dilihat dari masing-masing indikator, terdapat indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya kurang dari 100 persen, yaitu: (1) indikator “Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat” dengan capaian kinerjanya sebesar 96,88 persen, dan (2) indikator “Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS” capaian kinerjanya sebesar 60,50 persen.

Pada indikator “Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat”, capaian kinerjanya dapat dikatakan cukup memuaskan meskipun kurang dari 100 persen. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi capaian kinerja indikator tersebut, antara lain dilihat dari sisi pengajar/widyaiswara, konsumsi, akomodasi, serta sarana prasarana penunjang proses pembelajaran di kelas. Dalam hal ini Pusdiklat BPS terus melakukan upaya peningkatan kinerja yang lebih baik, seperti meningkatkan kualitas pengajar/widyaiswara dengan menyertakan widyaiswara dalam diklat-diklat yang diperlukan. Selain itu, peningkatan sarana prasarana juga telah dilakukan yaitu perbaikan kamar mandi asrama untuk peserta diklat yang dilengkapi dengan *water heater* (air panas dingin), meningkatkan kebersihan dan berusaha menyediakan konsumsi yang lebih baik.

Indikator kedua yang capaian kinerjanya jauh dari target yang diharapkan adalah Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga akan

diperoleh SDM yang lebih berkualitas. Namun pada tahun 2017, capaiannya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Dari target sebanyak 200 pegawai, terealisasi 121 pegawai mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS. Salah satu faktor penyebab adalah banyaknya jumlah pegawai dari unit kerja asal yang masih menjalani tugas belajar dan belum aktif bekerja. Hal ini mempengaruhi jumlah SDM di unit kerja asal yang diusulkan menjadi calon peserta tugas belajar pada tahun 2017. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai yang bekerja, terjadi pembatasan calon jumlah peserta tugas belajar dari masing-masing eselon 2.

Indikator sasaran strategis yang menunjukkan capaiannya lebih dari 100 persen adalah “Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan” (107,61 %) dan “Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik” (102,63 %). Hal ini menunjukkan bahwa peserta diklat dapat menerima materi dengan baik berkat bimbingan dan arahan dari pengajar/widyaiswara. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat juga telah sedikit melebihi dari target yang diharapkan dengan capaian kinerja sebesar 100,39 persen.

Indikator “Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus” dan “Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan” sudah sesuai dengan target (100 persen).

Keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mencapai target kinerja bahkan melebihi dari yang telah ditargetkan, hal ini tidak terlepas dari peranan masing-masing indikator kinerja yang memberikan sumbangan cukup besar meskipun masih ada beberapa indikator yang belum berhasil mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai usaha akan terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian kinerja di masa yang akan datang.

3.2. Perkembangan Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Tahun 2017 terhadap Realisasi Kinerja Tahun 2016

Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan yang tertuang dalam indikator kinerja.

Tujuan

Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima

Dalam rangka mewujudkan visi Pusdiklat BPS yaitu “Pusdiklat BPS sebagai pusat unggulan pelatihan statistik dan teknologi informasi dalam pengembangan kapasitas SDM aparatur negara yang kompeten dan profesional, berintegritas serta amanah”, ditetapkan tujuan capaian kinerja yaitu “Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima”.

Tujuan capaian kinerja Pusdiklat BPS digambarkan melalui indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat. Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa berdasarkan target PK 2017 sebesar 92,33 persen diperoleh realisasi persentase kepuasan peserta diklat sebesar 89,45 persen. Dari angka tersebut dihasilkan capaian kinerja tujuan sebesar 96,88 persen. Hal ini menggambarkan bahwa hampir seluruh peserta diklat merasakan kepuasan terhadap penyelenggaraan diklat, meskipun belum 100 persen mengingat masih

ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaiki agar dapat mencapai kinerja yang lebih baik.

Capaian kinerja tujuan diatas tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2016 karena indikator tersebut belum tersedia pada tahun 2016.

Tabel 5. Capaian Kinerja Tujuan : Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2017

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan terhadap realisasi 2016 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	92,33	89,45	96,88	0	-

Sasaran 1

Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima

Sesuai dengan Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik disebutkan bahwa Pusklat BPS mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional.

Selain kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional, Pusklat juga menyelenggarakan pengelolaan Izin Belajar dan Tugas Belajar bagi pegawai BPS yang bertujuan untuk lebih meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sejalan dengan itu, sasaran pertama yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS dalam aspek layanan pendidikan dan pelatihan diukur melalui 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran ini dapat dikatakan hampir tercapai dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 94,60 persen. Target dan pencapaian tahun 2017 serta perbandingan terhadap realisasi tahun 2016 pada masing-masing IKU dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima Tahun 2017

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan terhadap realisasi 2016 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	92	99	107,61	90	10
Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	95	97,50	102,63	94	3,72
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	80	80	100	-	-
Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	92,33	89,45	96,88	92,64	-3,44
Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100	100	100	100	0
Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	200	121	60,50	142	-14,79
Rata rata Capaian Kinerja			94,60		

Bila dibandingkan dengan target 2017, pada sasaran pertama terdapat 2 (dua) IKU yang tingkat capaian kinerjanya melampaui dari target yang ditetapkan. Indikator tersebut adalah Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan dan indikator Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik. Sementara itu, terdapat 2 (dua) IKU pula yang sesuai dengan target yaitu indikator Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus serta indikator Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan. Sedangkan untuk indikator yang kurang dari target juga terdapat 2 (dua) indikator yaitu indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat dan indikator Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS. Indikator-indikator tersebut secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. **IKU 1 : Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang Lulus dengan Kategori Memuaskan**

Dalam rangka mendukung kelancaran tugas pegawai, diperlukan peningkatan kapasitas SDM yang memadai baik dari sisi kemampuan teknis maupun manajerial. Peningkatan kapasitas SDM tersebut dilakukan melalui pembinaan pegawai baik berupa diklat prajabatan maupun diklat kepemimpinan.

Pada tahun 2017, Pusdiklat BPS telah menyelenggarakan Diklat Prajabatan Golongan III dan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV dan Tingkat III. Selama diklat berlangsung, penyelenggara melakukan evaluasi dan penilaian terhadap peserta yang mencakup aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Klasifikasi peserta berdasarkan predikat kelulusan adalah sangat memuaskan dengan nilai lebih dari 92,5; memuaskan dengan nilai 85-92,5; cukup memuaskan dengan nilai 77,5-85; kurang memuaskan dengan nilai 70-77,5; dan tidak memuaskan dengan nilai kurang dari 70.

Berdasarkan pencapaian nilai peserta, tingkat capaian kinerja pada indikator persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan telah melebihi target yang diharapkan yaitu mencapai 107,61 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 99 persen dibandingkan target PK 2017 sebesar 92 persen. Capaian kinerja tersebut menggambarkan hasil yang sangat memuaskan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang sebesar 90 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 10 persen.

Angka kelulusan yang telah melebihi target menunjukkan bahwa peserta diklat kepemimpinan III dan IV telah berhasil mengimplementasikan rencana proyek perubahan di tempat asal dengan mengubah pengelolaan kegiatan organisasinya ke dalam Proyek Perubahan (PP). Bagi peserta diklat prajabatan mereka telah berhasil mengaktualisasikan nilai-nilai dasar profesi PNS di tempat tugas masing-masing.

Kenaikan capaian kinerja diatas tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat, yaitu pimpinan/pejabat struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh staf Pusdiklat BPS.

Informasi mengenai Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang telah diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2017 dapat dilihat sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Diklat PNS), ditetapkan jenis diklat secara umum adalah Diklat Prajabatan dan Diklat dalam Jabatan. Diklat Prajabatan merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi PNS. Diklat ini dilaksanakan untuk

memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, dan budaya kerja organisasi agar mampu melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (Perka LAN) Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, maka sejak Tahun 2017 Diklat Prajabatan Golongan III berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar CPNS Golongan III.



Gambar 6. Kegiatan Pembukaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III

Pada tahun 2017 Pusdiklat BPS telah melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III. Berdasarkan Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016, pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Golongan III dilaksanakan selama 113 hari kerja atau 1141 Jam Pelatihan (JP), dengan perincian 33 hari kerja atau setara dengan 288 JP untuk pembelajaran klasikal dan 80 hari kerja

atau setara dengan 853 JP untuk pembelajaran non klasikal atau aktualisasi di tempat kerja. Struktur kurikulum Pelatihan Dasar CPNS Golongan III terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu Kurikulum Pembentukan Karakter PNS dan Kurikulum Penguatan Kompetensi Teknis Bidang Tugas. Kurikulum pembentukan karakter PNS, terdiri dari 4 (empat) Agenda, yaitu Agenda sikap perilaku dan disiplin PNS, Agenda nilai-nilai dasar PNS, Agenda kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, dan Agenda Habitulasi. Sedangkan kurikulum penguatan kompetensi teknis bidang tugas terdiri dari 2 (dua), yaitu Kompetensi teknis umum/administrasi dan Kompetensi teknis substantif.



Gambar 7. Kegiatan Pembelajaran Diklat Prajabatan Golongan III

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pelatihan Dasar CPNS Golongan III ini adalah ceramah yang dikombinasi dengan tanya jawab, diskusi kelompok, permainan, pendalaman materi dan seminar. Pada tahun 2017 Pusdiklat BPS melaksanakan Pelatihan Dasar CPNS

Golongan III sebanyak 12 (dua belas) angkatan yaitu Angkatan I sampai dengan XII dengan peserta sebanyak 436 orang.

b. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) bertujuan membentuk moral, kompetensi, dan sikap PNS untuk menduduki jabatan eselon tertentu. Pusdiklat BPS pada tahun 2017 menyelenggarakan Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat IV dan tingkat III.

Diklatpim Tingkat IV

Diklatpim tingkat IV bertujuan membentuk kompetensi kepemimpinan operasional dan membentuk pemimpin perubahan pada pejabat struktural eselon IV yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 8. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat IV

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistem “*On Campus* dan *Off Campus*”. Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara “*On Campus*” selama 11 hari. Tahap 2 adalah tahap “*Taking Ownership*” atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara “*Off Campus*” selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 17 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory* atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara “*On*

Campus” di Pusdiklat, tetapi dengan pertimbangan efisiensi dan mendekati verifikasi kegiatan serta diseminasi kegiatan maka Evaluasi juga dapat dilakukan di (Ibukota) Provinsi asal peserta. BPS bekerja sama dengan LAN RI pada tahun anggaran 2017, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV sebanyak 5 (lima) angkatan yaitu Angkatan ke-97 sampai dengan Angkatan ke-101 dengan jumlah peserta sebanyak 167 orang.



Gambar 9. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat IV

Diklatpim Tingkat III

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat III bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon III yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Melalui Diklatpim diharapkan setiap peserta diklat memiliki kemampuan melaksanakan pelayanan publik pada sektor yang menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, melalui diklat ini diharapkan

terwujudnya kesamaan visi dan misi, serta dapat melaksanakan dan meningkatkan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat.



Gambar 10. Kegiatan Pembukaan Diklatpim Tingkat III

Proses kegiatan Diklat dilakukan dengan pendekatan proses belajar orang dewasa (andragogi). Berdasarkan pendekatan ini maka metode yang digunakan adalah ceramah/kuliah, diskusi, seminar, praktek, simulasi, studi kasus dan observasi lapangan. Seperti halnya Diklatpim Tingkat IV, pelaksanaan Diklatpim Tingkat III mulai tahun 2014 ini dilakukan dengan Pola Baru yang masing-masing dilaksanakan dalam 5 tahap dengan sistim “*On Campus* dan *Off Campus*”. Tahap 1 adalah tahap Diagnosa Kebutuhan Perubahan Organisasi yang dilaksanakan secara “*On Campus*” selama 10 hari. Tahap 2 adalah tahap “*Taking Ownership*” atau *Breakthrough 1* yang dilaksanakan secara “*Off Campus*” selama 5 hari di tempat kerja asal. Tahap 3 adalah tahap Merancang Perubahan dan Membangun tim, yang dilakukan selama 15 hari. Selanjutnya adalah Tahap 4 yang merupakan *Breakthrough 2* atau *Leadership Laboratory*

atau juga implementasi Proyek Perubahan yang dilakukan untuk kedua Diklatpim masing-masing selama 60 hari di tempat asal peserta Diklat. Tahap terakhir atau tahap 5 adalah tahap Evaluasi yang standarnya dilakukan secara “*On Campus*” di Pusdiklat. BPS bekerja sama dengan LAN RI pada tahun anggaran 2017, telah melaksanakan Diklat Kepemimpinan Tingkat III sebanyak 1 (satu) angkatan yaitu Angkatan ke-34 dengan jumlah peserta sebanyak 34 orang.



Gambar 11. Kegiatan Pembelajaran Diklatpim Tingkat III

Diklatpim Tingkat II

Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) tingkat II bertujuan meningkatkan kompetensi kepemimpinan pejabat struktural eselon II yang akan berperan dan melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di instansinya masing-masing. Sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, PNS pemangku jabatan struktural eselon II memerlukan

standar kompetensi jabatan yang meliputi kompetensi dasar (integritas, kepemimpinan, perencanaan dan pengorganisasian, kerjasama, fleksibilitas) dan sejumlah kompetensi bidang lainnya.

Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II dilaksanakan oleh Lembaga Diklat Pemerintah yang Terakreditasi untuk Diklatpim Tingkat II, seperti Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Pusdiklat BPS hanya memfasilitasi biaya perjalanan peserta BPS. Pada tahun 2017, peserta Diklatpim Tingkat II dari BPS mengikuti diklat di LAN RI sebanyak 10 orang, terdiri dari 2 orang yang diselenggarakan oleh LAN RI Jakarta, 4 orang diselenggarakan oleh LAN RI Jawa Barat (TC Bandung dan Mataram), 2 orang diselenggarakan oleh LAN RI Jawa Tengah, dan 2 orang diselenggarakan oleh LAN RI Jawa Timur. Diklatpim Tk. II dilaksanakan selama 405 jam pelatihan (@45 menit) atau 135 sesi, dan peserta diasramakan.

2. IKU 2 : Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang Lulus dengan Kategori Baik

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas SDM di lingkungan Badan Pusat Statistik adalah melalui pendidikan dan pelatihan di bidang teknis. Oleh karena itu, peran Pusdiklat BPS bersama unit kerja teknis terkait sangat dibutuhkan dalam merancang jenis diklat teknis substansi yang efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan SDM yang memiliki kompetensi di bidang teknis.

Pusdiklat BPS menyelenggarakan juga Diklat Fungsional Statistisi dan Pranata Komputer, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para pejabat fungsional baik untuk pegawai BPS ataupun untuk pegawai Kementerian/Lembaga lain.

Pada diklat teknis dan fungsional, penentuan kelulusan peserta dilakukan melalui beberapa kategori yaitu kategori sangat memuaskan,

baik sekali, dan baik. Unsur-unsur yang menjadi penilaian kelulusan peserta diklat teknis dan fungsional mencakup beberapa kriteria sebagai berikut:

1. Penguasaan materi yang dilihat berdasarkan nilai ujian tertulis dan praktikum
2. Penyusunan kertas kerja kelompok
3. Nilai-nilai etika PNS seperti disiplin, prakarsa, dan kerja sama kelompok selama kegiatan pembelajaran.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh nilai kelulusan peserta yang minimal berkategori baik. Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah melampaui target yaitu sebesar 102,63 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 97,50 persen terhadap target PK 2017 sebesar 95 persen. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang sebesar 94 persen, maka terjadi kenaikan sebesar 3,72 persen.

Berdasarkan capaian kinerja yang diperoleh tersebut menunjukkan bahwa peserta telah dapat mengetahui, memahami dan menerapkan materi yang diajarkan dengan baik. Keadaan tersebut juga tidak terlepas dari *performance* (penampilan, teknik mengajar, dan buku modul yang menunjang) para pengajar/widyaiswara yang telah memberikan materi dengan baik sehingga dapat diserap oleh seluruh peserta diklat.

Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional

Diklat Teknis dan Fungsional yang diselenggarakan pada tahun 2017 adalah 5 kegiatan diklat yang terdiri dari Diklat Fungsional sebanyak 3 diklat dan Diklat Teknis sebanyak 2 diklat. Total Peserta yang dilatih adalah sebanyak 175 orang. Penjelasan laporan kegiatan selengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli

Diklat fungsional statistisi tingkat ahli adalah diklat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman serta pelatihan kepada PNS yang berminat untuk menduduki jabatan fungsional statistisi pada tingkat ahli. Adapun sasaran dari diklat ini adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Statistisi Tingkat Ahli. Kegiatan ini dibiayai dari sumber dana APBN BPS tahun 2017.



Gambar 12: Foto bersama Pimpinan Gambar 13: Kunjungan ke BPS RI Pusdiklat BPS

Pada tahun 2017 diklat ini dilaksanakan sebanyak 2 kali, di awal tahun dan akhir tahun. Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVII dilaksanakan pada tanggal 16 Januari-17 Februari 2017 di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta, dengan jumlah peserta 25 orang, yang terdiri dari 15 laki-laki dan 10 perempuan. Ada sebanyak 23 peserta berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Provinsi dan sisanya 2 orang peserta non BPS yakni dari Pemerintah Kabupaten Belitung dan Kementerian Perdagangan.

Pada tanggal 30 Oktober-28 November 2017 dilaksanakan Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVIII. Diklat ini diselenggarakan di Kampus Diklat Bina Swadaya Wisma Hijau, Jl. Raya Bogor Km.30, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Peserta diklat berjumlah 23 orang, yang terdiri dari 17 laki-laki dan 6 perempuan. Ada sebanyak 19 peserta berasal dari BPS yang merupakan perwakilan dari BPS Provinsi dan sisanya 4 orang peserta non BPS yakni dari Kementerian Agama Kanwil Provinsi Riau, Kementerian Perdagangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lahat, Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Kepulauan Anambas.



Gambar 14: Foto bersama Pimpinan Pusdiklat BPS



Gambar 15 : Acara Pembukaan Diklat

Pengajar diklat adalah para pejabat struktural dan fungsional pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang kompeten di bidang masing-masing. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli Angkatan XVIII dan XVIII 100 persen dinyatakan lulus dan menerima sertifikat lulus diklat.

b. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

Selain diklat fungsional statistisi, Pusdiklat BPS pada tahun 2017 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas

pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Ahli. Kegiatan diklat ini dibiayai oleh APBN BPS tahun 2017.

Adapun pelaksanaan diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan XIII yaitu pada tanggal 30 Oktober s.d. 28 November 2017, yang bertempat di Kampus Diklat Bina Swadaya Wisma Hijau, Jl. Raya Bogor Km. 30, Mekarsari, Cimanggis, Depok. Diklat ini tidak dilaksanakan di Pusdiklat BPS dikarenakan sedang dilakukannya renovasi kamar asrama peserta diklat Pusdiklat BPS untuk jangka waktu tertentu. Jumlah peserta ada sebanyak 16 orang, terdiri dari 15 (lima belas) laki-laki dan 1 (satu) orang wanita. Umumnya peserta berasal dari non BPS, yaitu ada sebanyak 1 (satu) orang berasal dari Pusdiklat Sekretariat Negara, 1 (satu) orang berasal dari Lembaga Sandi Negara, 1 (satu) orang berasal dari LIPI, 5 (lima) orang berasal dari Direktorat Jenderal Pajak, 1 (satu) orang berasal dari Pemerintah Kota Banjarmasin, 1 (satu) orang berasal dari Universitas Padjadjaran, dan 1 (satu) orang berasal dari Pemerintah Provinsi Riau.

Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan fungsional Pusdiklat BPS dan BPS Pusat yang kompeten dibidang komputer. Evaluasi nilai dilakukan dengan menjumlahkan seluruh unsur penilaian sesuai dengan bobotnya masing-masing. Hasil dari evaluasi nilai memperlihatkan rata-rata nilai seluruh peserta sebesar 85,24 dengan nilai tertinggi 89,65 dan nilai terendah 76,76 dari persyaratan nilai yang ditentukan. Seluruh peserta Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli Angkatan XIII Tahun 2017 dinyatakan lulus dan berhak mendapatkan sertifikat tanda kelulusan.



Gambar 16 : Foto bersama Pimpinan Pusdiklat BPS



Gambar 17 : kegiatan pembelajaran di kelas

c. Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil (PNBP)

Selain diklat fungsional prakom ahli, Pusdiklat BPS pada tahun 2017 juga melaksanakan Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil Angkatan II dengan pendanaan yang bersumber dari PNBP. Tujuan diklat tersebut sebagai bentuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPS sebagai instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Komputer; melaksanakan tugas pokok dan fungsi pusdiklat sebagai penyelenggara diklat teknis dan fungsional selain itu; juga bertujuan untuk membentuk standar kompetensi yang perlu dimiliki oleh pejabat fungsional pranata komputer.

Sasaran diklat adalah pegawai yang bekerja di Instansi Pemerintahan yang akan menduduki dan melaksanakan tugas pada Jabatan Fungsional Pranata Tingkat Terampil. Kegiatan diklat ini dibiayai oleh APBN Kementerian Keuangan dan BKPSDM Kabupaten Brebes tahun 2017.

Adapun pelaksanaan diklat pada tanggal 9 Oktober sampai dengan 9 November 2017 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta sebanyak 12 orang yang terdiri dari 9 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari Kementerian Keuangan sebanyak 10 (sepuluh) orang dan 2 (dua) orang berasal dari BKPSDM Kabupaten Brebes. Pengajar dalam diklat ini adalah para Pejabat struktural dan

fungsional Pusdiklat BPS, Dosen STIS, serta pegawai BPS Pusat yang kompeten di bidang IT. Seluruh peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.

Untuk melengkapi kegiatan tersebut dilengkapi dengan Perjanjian kerjasama (PKS) antara Pusdiklat BPS dengan BKPSDM Kabupaten Brebes No. : 890/1266A/ 2017 dan No. : 50.A/KS.P/03-X/2017. Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Pusdiklat BPS dengan Pusdiklat Keuangan Umum No. : PRJ-164/PPK/KU/2017 dan No. : 50/KS.P/03-X/2017.



Gambar 17 : Foto bersama Pimpinan Pusdiklat

d. Diklat Teknis Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP)

Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perubahan struktur organisasi dengan adanya penambahan sub bagian pengadaan barang/jasa di level BPS Provinsi sebagai unit pelaksana pengadaan barang/jasa yang berperan sebagai *centre of excelent*. Demikian, Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Teknis Penguatan Kompetensi SDM Pengelola unit layanan pengadaan (ULP) Tahun 2017 untuk memperkuat kedudukan subbagian Pengadaan Barang/Jasa di daerah mencakup pembekalan tugas, fungsi dan teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pada Tahun 2017 Pusdiklat Badan Pusat Statistik RI menyelenggarakan Diklat Teknis Penguatan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengelola Unit Layanan Pengadaan (ULP) Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2017. Diklat ini bermaksud

untuk meningkatkan pemahaman Pegawai BPS dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara terintegrasi.

Adapun pelaksanaan diklat untuk Angkatan I dilaksanakan pada tanggal 10 Juli sampai dengan 12 Juli 2017 yang bertempat di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Jumlah peserta untuk Angkatan I sebanyak 35 orang yang terdiri dari 23 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah, BPS Pusat dan Pusdiklat BPS. Pengajar dalam diklat ini dari LKPP dan Pejabat Struktural BPS Pusat yang berkompeten. Semua peserta berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.

Sedangkan bagi peserta Diklat untuk Angkatan II sebanyak 35 orang yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 16 orang perempuan. Peserta Diklat berasal dari BPS Daerah, BPS Pusat dan Pusdiklat BPS. Pengajar dalam diklat ini dari LKPP dan Pejabat Struktural BPS Pusat yang berkompeten. Semua peserta Diklat Angkatan II berhasil menyelesaikan diklat dengan tingkat kelulusan 100 persen.



Gambar 19 : Foto bersama Pimpinan BPS dan Peserta Diklat Teknis Penguatan Kompetensi SDM Pengelola ULP Angkatan I



Gambar 20 : Foto bersama Pimpinan BPS dan Peserta Diklat Teknis Penguatan Kompetensi SDM Pengelola ULP Angkatan II

e. **Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklat Kepemimpinan Tingkat III dan IV**

Pusdiklat juga menyelenggarakan diklat bagi Pejabat Struktural dan Fungsional Widyaiswara yang bertujuan membentuk standar kompetensi yang

dimiliki oleh Pejabat Fungsional Widyaiswara dalam melakukan kegiatan pengajaran Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III dan IV serta untuk menambah wawasan pengetahuan bagi Pejabat Struktural. Adapun sasaran diklat ini adalah tersedianya tenaga pengajar yang kompeten dalam menjelaskan kebijakan dan isu strategis Diklat Aparatur, menguasai dan memfasilitasi agenda pembelajaran pada Diklatpim Tingkat III dan IV.

Diklat ini dilaksanakan selama 10 hari efektif yaitu dari tanggal 13 sampai dengan 23 November 2017. Ada sebanyak 29 orang peserta yang merupakan Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Widyaiswara. Sebanyak 7 orang merupakan Pejabat Struktural, 20 orang peserta merupakan Pejabat Fungsional Widyaiswara Pusdiklat BPS dan 2 orang peserta berasal dari pusdiklat Kementerian Sekretariat Negara. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap peserta dapat diketahui bahwa sebanyak 27 orang peserta dinyatakan lulus dan 2 orang peserta dinyatakan tidak lulus. Banyaknya peserta yang lulus berdasarkan kualifikasi sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup memuaskan, masing-masing sebanyak 2 orang peserta, 18 orang peserta, dan 7 orang peserta.



Gambar 21 : Pembelajaran di kelas



Gambar 22 : Kegiatan Ice Breaking

3. IKU 3 : Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus

Standarisasi dan Sertifikasi Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah, pada tahun 2017 Pusdiklat BPS menyelenggarakan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi terdiri dari 8 angkatan yaitu angkatan XI s.d XVIII yang merupakan hasil kerja sama dengan LKPP. Tujuan diklat ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJ) dalam melaksanakan tugas dan jabatan sebagai pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara profesional dan beretika.

Kegiatan diklat ini diikuti oleh pegawai BPS yang akan ditunjuk sebagai panitia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi angkatan XI dilaksanakan pada tanggal 25-29 April 2017, angkatan XII tanggal 12-16 Juni 2017, angkatan XIII dan XIV tanggal 16-20 Oktober 2017, angkatan XV dan XVI tanggal 23-27 Oktober 2017 diselenggarakan di Pusdiklat BPS Jl. Raya Jagakarsa No. 70, Lenteng Agung, Jakarta. Sedangkan angkatan XVII dan XVIII dilaksanakan 20-24 November 2017 di Hotel Santika Depok, Jalan Margonda Raya No. 88, Depok-Jawa Barat. Seluruh peserta diklat berasal dari pegawai BPS berjumlah 263 orang terdiri dari 162 peserta laki-laki dan 101 peserta perempuan.

Pengajar diklat berasal dari berbagai instansi pemerintah yang telah memiliki sertifikat mengajar dari LKPP. Selain kegiatan belajar-mengajar, diklat ini juga menyelenggarakan ujian sertifikasi. Ujian sertifikasi dilaksanakan secara online di laboratorium komputer pusdiklat BPS lantai 3.

Tabel 6 menunjukkan bahwa hasil capaian kinerja dari indikator persentase peserta diklat pengadaan barang dan jasa yang lulus adalah sebesar 100 persen. Angka tersebut diperoleh dari perbandingan realisasi sebesar 80 persen terhadap target PK 2017 sebesar 80 persen. Untuk indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, karena indikator tersebut belum ada pada tahun 2016.



Gambar 24 : Pembelajaran di kelas



Gambar 26 : Kegiatan Ujian di Lab Komputer

IKU 4 : Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat

Penyelenggaraan diklat dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara penyelenggara, peserta diklat, dan pengajar/widyaiswara. Dalam upaya pelaksanaan diklat yang lebih baik dan peningkatan mutu penyelenggaraan diklat, perlu diketahui seberapa jauh kemampuan para peserta dalam menyerap materi, kemampuan dan kualitas tenaga pengajar/widyaiswara terhadap materi yang diberikan di kelas, serta pelayanan penyelenggara dan sarana prasarana yang memadai. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pelayanan penyelenggara terhadap kegiatan diklat yang diadakan oleh Pusdiklat BPS, peserta diminta melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan melalui saran-saran dan komentar. Penyelenggaraan diklat yang dievaluasi

meliputi fasilitas akomodasi, konsumsi, dan penyelenggara. Melalui evaluasi tersebut dapat diketahui kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Kepuasan peserta diklat merupakan salah satu yang dijadikan indikator capaian kinerja untuk memenuhi sasaran terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Tinggi rendahnya capaian kinerja yang diperoleh menjadi salah satu acuan bagi Pusdiklat BPS agar dapat meningkatkan mutu pelayanan diklat ke arah yang lebih baik di masa mendatang. Untuk mengetahui capaian kinerja dari indikator tersebut dapat dilihat melalui besarnya realisasi terhadap target PK 2016. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Berdasarkan tabel 6 dapat dilihat bahwa capaian kinerja pada indikator kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat adalah sebesar 96,88 persen. Angka tersebut diperoleh dari realisasi sebesar 89,45 persen dibandingkan target PK 2017 sebesar 92,33 persen. Tingkat capaian yang diperoleh sedikit lebih rendah dibandingkan target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 yang sebesar 92,64 persen, maka terjadi penurunan sebesar 3,44 persen.

Meskipun terjadi penurunan angka realisasi dibandingkan tahun 2016, namun angka capaian 96,88 persen sudah relatif menunjukkan ke arah yang lebih baik. Perbaikan terjadi berkat kerjasama dan komitmen para penyelenggara untuk selalu memperbaiki layanan berdasarkan masukan dari peserta. Peserta memberi masukan baik melalui angket pada periode tertentu maupun melalui masukan sewaktu-waktu terkait penyelenggaraan diklat.

Di sisi lain, evaluasi penyelenggaraan dilakukan terhadap widyaiswara/pengajar yang terlibat langsung terhadap proses kegiatan

belajar mengajar. Berdasarkan pengisian angket yang berisi penilaian peserta diklat terhadap pengajar diperoleh kesimpulan bahwa widyaiswara/pengajar dapat menyampaikan materi dengan baik, dengan nilai rata-rata 87,65.

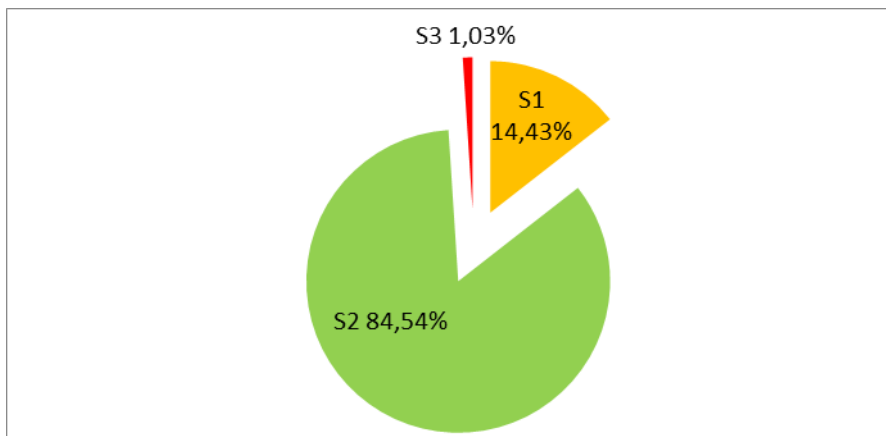
Secara umum proses pembelajaran sudah ke arah lebih baik, terutama pada diklat prajabatan dan diklatpim. Dengan adanya pelaksanaan diklat melalui pola baru, peserta merasa lebih menyukai pola baru tersebut karena materi yang dipelajari dapat diaplikasikan langsung di tempat tugas masing-masing melalui aktualisasi bagi diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi diklatpim.

Untuk menunjang kenyamanan peserta dalam mengikuti diklat, telah dilakukan pembenahan fasilitas-fasilitas seperti kamar asrama, kelas, laboratorium, dan fasilitas lainnya melalui pemeliharaan bangunan dan gedung. Untuk meningkatkan sarana diklat di bidang kesehatan dan hiburan, Pusdiklat BPS menyediakan fasilitas alat-alat fitness, kursi pijat elektrik, dan alat musik karaoke yang berada di ruang khusus di gedung basement. Sarana tersebut diharapkan dapat menambah fasilitas peserta sebagai penunjang kesehatan dan hiburan di sela-sela kesibukan mengikuti diklat. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan sarana prasarana diklat tersebut juga merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

4. IKU 5 : Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan

PNS yang ingin meningkatkan kemampuan dan keahliannya dalam rangka mendukung tugas sebagai aparatur negara, dapat mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri melalui jalur Izin Belajar (IB). Pusdiklat BPS sebagai pengelola IB melakukan kegiatan pelaksanaan pemberian IB dan mengadministrasikannya bagi pegawai BPS

yang ingin melanjutkan sekolah melalui jalur IB. Seluruh IB program S2 dan S3 diproses oleh Pusdiklat dengan mendapat rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Utama (Sestama). Sementara itu untuk pegawai yang akan melanjutkan ke jenjang S1, bagi pegawai BPS Pusat surat IB-nya dibuat oleh Pusdiklat sedangkan bagi pegawai BPS Provinsi dan Kabupaten/Kota dibuat oleh Kepala BPS Provinsi yang ditembuskan ke Pusdiklat dan Biro Kepegawaian.



Gambar 27. Persentase Penyelesaian Surat Izin Belajar oleh Pusdiklat BPS pada Jenjang Pendidikan S1, S2, dan S3, Tahun 2017

Persentase penyelesaian Surat Izin Belajar yang dilakukan Pusdiklat BPS pada jenjang pendidikan S1, S2 dan S3 dapat dilihat pada Gambar 26. Surat Izin Belajar yang telah diterbitkan oleh Pusdiklat BPS sebagian besar pada jenjang pendidikan S2 sebesar 84,54 persen. Sementara itu, untuk S1 sebesar 14,43 persen dan S3 sebesar 1,03 persen.

Penyelesaian surat izin belajar menjadi salah satu indikator capaian kinerja dalam rangka terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan. Pada Tabel 6 ditunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja untuk surat izin belajar yang diselesaikan pada tahun 2017 sesuai dengan target PK 2017 yaitu 100 persen.

Capaian kinerja yang sesuai harapan tersebut menunjukkan kinerja Pusdiklat BPS yang cukup berhasil dalam mewujudkan layanan diklat sekaligus untuk peningkatan dan pengembangan SDM pegawai BPS yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya.

5. IKU 6 : Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS

Selain mengelola izin belajar, Pusdiklat BPS mempunyai tugas menyelenggarakan program Tugas Belajar (TB). Program tersebut dilakukan Pusdiklat BPS dengan kegiatan mengirim dan mengelola TB bagi pegawai BPS baik ke dalam maupun ke luar negeri. Program TB yang dimaksud di sini mencakup untuk program pendidikan gelar S2 dan S3, sehingga tidak ada untuk program pendidikan non gelar (*short course* dan *post doctoral*). Dari sisi pembiayaan, program TB yang diselenggarakan oleh Pusdiklat terdiri dari:

1. Beasiswa APBN BPS
Program ini adalah kerjasama rintisan gelar S2 maupun S3 antara BPS dengan perguruan tinggi yang ada di dalam negeri seperti UI, ITB, IPB, UGM, UNPAD, dan ITS.
2. Beasiswa APBN Non BPS
Program ini berupa tawaran beasiswa dari Bappenas atau Kementerian/Lembaga lain baik untuk program S2 dalam negeri, luar negeri, maupun *Double Degree* dan S3.
3. Beasiswa Non APBN
Penyedia utama beasiswa non APBN adalah STUNED untuk studi di Belanda dan AAS untuk studi di Australia. Selain itu terdapat pula beberapa negara sponsor beasiswa seperti Jepang, Jerman, Belanda, dan Swiss namun tidak ditawarkan setiap tahun.

4. Individu pegawai juga dapat mencari sendiri sponsor beasiswa. Setelah mendapat izin dari atasannya (Eselon II), maka dapat diajukan ke Pusdiklat untuk mendapatkan status TB dengan menandatangani Surat Perjanjian Tugas Belajar (SPTB) dan menerima Surat Keputusan Tugas Belajar (SKTB) dari Biro Kepegawaian.

Pelaksanaan program TB Rintisan Gelar (APBN) didahului adanya *Memorandum of Understanding* (MOU) antara BPS dengan Universitas/ Perguruan Tinggi (Univ/PT), yang dilanjutkan dengan pembuatan Perjanjian Kerjasama setiap akan mengirim calon mahasiswa baru. Pusdiklat BPS juga menyusun dan mengajukan rencana biaya pendidikan, tunjangan hidup, buku, dan riset peserta Tugas Belajar APBN dan merencanakan jumlah pegawai yang akan ditugasbelajarkan.

Penyelenggaraan program beasiswa APBN BPS merupakan salah satu wujud layanan Pusdiklat BPS untuk mengakomodir pegawai BPS melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari program ini diharapkan dapat menyiapkan calon-calon pimpinan BPS yang akan menduduki jabatan struktural BPS baik di pusat maupun daerah. Disamping itu juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pejabat fungsional seperti fungsional pranata komputer, statistisi, peneliti, widyaiswara, dosen, dan sebagainya.



Gambar 28 : Pembekalan Peserta TB APBN BPS S2 UGM Jurusan Magister Ekonomi Pembangunan (MEP) Tahun 2017 di Kampus UGM Yogyakarta

Pelaksanaan program doktor dan master dilakukan dengan mengirim staf BPS ke universitas di luar negeri maupun di dalam negeri. Program ini mendapatkan dukungan sepenuhnya dari berbagai lembaga internasional dan berbagai program bilateral lainnya.

Tabel 7. Jumlah Pegawai BPS yang memperoleh Beasiswa S2 dan S3 Tahun 2017

No	Program Beasiswa	Sponsor				Jumlah Tugas Belajar
		APBN BPS	Dalam Negeri	Luar Negeri	Double Degree	
1	S2	116	33	8	6	163
2	S3	7	3	2	-	12
Jumlah		123	36	10	6	175

Pada tahun 2017, jumlah pegawai BPS yang memperoleh beasiswa sebanyak 175 orang terdiri dari 163 orang memperoleh beasiswa S2 dan 12 orang memperoleh beasiswa S3 (Tabel 7). Dari keseluruhan pegawai yang memperoleh beasiswa pada tahun 2017, sebanyak 123 orang disponsori dari APBN BPS dan 52 orang dari Non BPS baik dalam negeri maupun luar negeri.

Beasiswa APBN BPS tersebar di beberapa perguruan tinggi yaitu Institut Teknologi Bandung (ITB) program studi Informatika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) program studi Statistika, Universitas Padjadjaran (Unpad) program studi Statistika, Universitas Indonesia (UI) program studi ketenagakerjaan, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) program studi Statistika.



Gambar 29 :Kuliah Tamu Kepala Pusdiklat kepada Mahasiswa Kelas Kerjasama BPS S2 dan S3 UI Ilmu Ekonomi Tahun 2017 di Kampus UI Depok



Gambar 30 : Acara Wisuda Peserta Tugas Belajar S2 UI Ilmu Ekonomi Kependudukan dan Ketenagakerjaan Tahun 2017 di Kampus UI Depok

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS adalah sebesar 60,50 persen. Angka ini diperoleh dari perbandingan realisasi sebanyak 121 peserta terhadap target PK 2017 sebanyak 200 peserta. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2016 sebesar 142 peserta terdapat penurunan sebesar 14,79 persen. Penurunan jumlah peserta TB dibandingkan tahun 2016 dikarenakan oleh adanya efisiensi anggaran pada tahun 2017. Selain itu, banyaknya jumlah pegawai dari unit kerja asal yang masih menjalani tugas belajar dan belum aktif bekerja mempengaruhi jumlah SDM di unit kerja asal yang diusulkan menjadi calon peserta tugas belajar pada tahun 2017. Untuk mengantisipasi kekurangan pegawai yang bekerja, terjadi pembatasan calon jumlah peserta tugas belajar dari masing-masing eselon 2.

Capaian kinerja yang diperoleh pada indikator di atas menunjukkan bahwa peserta TB pada tahun 2017 tidak ada yang mengundurkan diri atau *drop out* sehingga perkuliahan berjalan lancar

dan sesuai dengan target yang diharapkan. Hal ini juga tidak terlepas dari adanya pelayanan Pusdiklat BPS yang berkinerja baik dalam menangani semua permasalahan penyelenggaraan TB baik dalam hal penanganan pemberian uang saku/biaya hidup, uang buku, uang riset, maupun biaya pendidikan. Selain itu pula kelancaran dalam hal penanganan peserta yang akan mengikuti ujian tesis baik penyediaan penguji maupun operasional lainnya.

Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan

Kelancaran dan keberhasilan tugas dan fungsi pokok Pusdiklat BPS dalam mewujudkan layanan pendidikan dan pelatihan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja yang transparan. Akuntabilitas kinerja yang transparan sangat diperlukan dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja.

Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan merupakan sasaran kedua dalam Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS tahun 2017. Sasaran tersebut dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam mengemban tugas di bidang pendidikan dan pelatihan.

Tabel 8. Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan Tahun 2017

IKU	Target 2017	Realisasi 2017	Capaian (%)	Realisasi 2016	Perubahan terhadap realisasi 2016 (%) $((3)/(5)*100)-100$
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	70,27	100,39	65,35	7,53
Rata rata Capaian Kinerja			100,36		

6. IKU : Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat

Salah satu hal yang menjadi inti dari reformasi birokrasi adalah akuntabilitas instansi pemerintah. Instansi pemerintah yang akuntabel semakin penting keberadaannya mengingat semakin tingginya ekspektasi dan tuntutan masyarakat atas pelayanan pemerintah. Pusdiklat BPS sebagai salah satu unsur dari instansi pemerintah juga harus meningkatkan akuntabilitasnya. Akuntabilitas dimaksud tidak hanya dari sisi keuangan saja, meskipun dari sisi tersebut mutlak diperlukan melainkan juga dari sisi kinerja. Dengan penguatan akuntabilitas ini, diharapkan akan memberi efek peningkatan kinerja yang pada gilirannya akan menghasilkan pelayanan prima baik kepada pegawai BPS maupun instansi lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014, yang dimaksud dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi yang dilakukan dalam rangka penilaian SAKIP ditujukan untuk menilai implementasi dan pengembangan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pusdiklat BPS dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Dalam evaluasi SAKIP komponen yang dinilai terdiri atas :

1. Perencanaan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja
3. Pelaporan Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Masing-masing komponen tersebut terbagi lagi ke dalam evaluasi sub komponen:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Perencanaan Strategis
 - 1). Pemenuhan Renstra
 - 2). Kualitas Renstra
 - 3). Implementasi Renstra
 - c. Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 1). Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 2). Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan
 - 3). Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pemenuhan Pengukuran
 - b. Kualitas Pengukuran
 - c. Implementasi Pengukuran

3. Pelaporan Kinerja
 - a. Pemenuhan Pelaporan
 - b. Kualitas Informasi Kinerja
 - c. Pemanfaatan Informasi Kinerja
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Pemenuhan Evaluasi
 - b. Kualitas Evaluasi
 - c. Pemanfaatan Hasil Evaluasi
5. Pencapaian Sasaran/Kinerja
 - a. Kinerja Yang Dilaporkan (Output)
 - b. Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome)

Sebagai acuan dalam pencapaian sasaran terwujudnya pengelolaan aset BMN dan akuntabilitas kinerja yang transparan adalah melalui indikator hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat. Indikator tersebut dapat menggambarkan bahwa semakin tinggi realisasi penilaian SAKIP menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Pada Tabel 8 dapat dilihat bahwa hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat pada tahun 2017 adalah sebesar 70,27 poin sedangkan target PK 2017 adalah sebesar 70 poin. Berdasarkan nilai tersebut diperoleh capaian kinerja sebesar 100,39 persen yang artinya bahwa tingkat pencapaian kinerja yang diperoleh telah melebihi dari target yang diharapkan. Angka ini sejalan dengan upaya Pusdiklat BPS dari tahun ke tahun untuk selalu memperbaiki Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hal ini terbukti dari adanya peningkatan poin sebesar 7,53 persen dibandingkan tahun 2016 yang sebesar 65,35 poin.

3.3. Capaian Kinerja Pusdiklat BPS Terhadap Target Renstra 2017 dan 2019

Rencana Strategis adalah proses pemilihan tujuan organisasi, penentuan kebijakan, dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Rencana Strategis merupakan proses perencanaan jangka menengah (lima tahun) yang formal untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk mengetahui keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya pengukuran terhadap indikator-indikator yang mewakili pencapaian kedua hal tersebut.

Berdasarkan Tabel 9, jika dibandingkan target Renstra tahun 2017 dan 2019, maka capaian indikator dari tujuan “Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima” dapat dikatakan berhasil bahkan melebihi dari target yang diharapkan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 103,06 persen dan 2019 sebesar 100,91 persen.

Indikator pertama yang terdapat pada Sasaran Strategis pertama tercatat bahwa realisasi persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan pada tahun 2017 sebesar 99 persen jauh lebih besar dibandingkan target Renstra tahun 2017 dan 2019 yang sebesar 92 persen dan 94 persen. Untuk indikator tersebut tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan penggalan lebih dalam pada proses perencanaan dan upaya yang lebih besar agar kinerja indikator tersebut semakin meningkat.

Di sisi lain capaian indikator kedua yaitu persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik telah berhasil melebihi target, yaitu realisasi sebesar 97,50 persen terhadap target renstra 2017 yang sebesar 92 persen dan target Renstra 2019 sebesar 94 persen. Untuk itu perlu penajaman target agar pengukuran keberhasilan Pusdiklat BPS terhadap indikator tersebut lebih tergambar.

Tabel 9. Perbandingan Realisasi Kinerja Pusklat BPS Tahun 2017 dengan Target Renstra Tahun 2017 dan 2019

Tujuan/Sasaran/IKU	Target Renstra		Realisasi 2017	Capaian terhadap Target (%)		
	2017	2019		2017	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
T.	Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima					
	Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	94	96	96,88	103,06	100,91
SS 1.	Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima					
	1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	92	94	99,00	107,61	105,32
	2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	92	94	97,50	103,72	102,63
	3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus			80,00		
	4. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	94	96	89,45	95,16	93,18

	5. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100	100	100,00	100	100
	6. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	200	324	121	60,50	37,35
SS 2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja yang Transparan					
	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	70	75	70,27	100,39	93,69

Realisasi pada indikator ketiga yaitu persentase peserta diklat pengadaan barang dan jasa yang lulus sebesar 80 persen, namun tidak dapat dibandingkan karena belum tertuang pada Renstra.

Capaian pada indikator keempat yaitu persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat belum dapat dikatakan berhasil dengan realisasi sebesar 89,45 persen. Angka tersebut kurang dari target Renstra tahun 2017 dan 2019 yaitu masing-masing sebesar 94 persen dan 96 persen. Sejalan dengan itu, untuk indikator tersebut tidak perlu dilakukan penurunan target melainkan perlu upaya dan kerja keras dari seluruh pihak terkait agar di masa mendatang diperoleh capaian kinerja yang lebih tinggi mengingat indikator kepuasan peserta diklat dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan kegiatan diklat.

Pada indikator kelima dari SS 1. yaitu persentase surat izin belajar yang diselesaikan diperoleh capaian kinerja yang telah sesuai dengan Renstra baik tahun 2017 maupun tahun 2019. Di sisi lain, capaian indikator keenam sangat jauh dari target tahun 2017 dan 2019. Tercatat jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS pada tahun 2017 sebesar 121 orang lebih kecil dibandingkan target Renstra

tahun 2017 dan 2019 yang sebesar 200 orang dan 324 orang. Untuk itu perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut. Selain itu, perlu penggalian lebih dalam lagi pada proses perencanaan kegiatan tahun 2018 agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

3.4. Kegiatan Prioritas Pusdiklat BPS Tahun 2017

Salah satu kegiatan prioritas yang diselenggarakan Pusdiklat BPS pada tahun 2017 adalah Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler. Diklat tersebut dilaksanakan pada awal tahun 2017 yang diperuntukkan bagi calon pegawai lulusan STIS (Sekolah Tinggi Ilmu Statistik) tahun 2016. Penempatan skala prioritas pada kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III Reguler dilakukan untuk mengantisipasi terkait peraturan pemerintah, yaitu Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014 tentang masa percobaan Calon PNS yang hanya berlaku 1 (satu) tahun.

Pada tahun ini, kegiatan diklat teknis yang masih menjadi prioritas adalah penyelenggaraan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan ini untuk memenuhi kompetensi pegawai BPS dalam keahlian pengadaan barang dan jasa pemerintah khususnya kegiatan pengadaan barang dan jasa di BPS. Untuk menampung banyaknya peserta kegiatan tersebut, kegiatan Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diadakan sebanyak 8 (delapan) kelas.

3.5. Upaya Efisiensi

Upaya efisiensi yang telah dilakukan Pusdiklat BPS selama tahun 2017 adalah:

1. Menindaklanjuti Instruksi Presiden RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, Pusdiklat BPS melakukan penghematan terhadap pagu sebesar Rp 1.415,87 juta sehingga total pagu yang pada awal tahun anggaran sebesar Rp 65.199,39 juta menjadi Rp 63.783,52 juta yang dapat digunakan hingga akhir tahun anggaran.

2. Dalam rangka kegiatan penyelenggaraan diklat, Pusdiklat BPS berupaya melakukan efisiensi penggunaan anggaran untuk menghasilkan output yang maksimal. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah pelaksanaan seminar evaluasi pada diklat prajabatan dan kepemimpinan. Untuk menghemat anggaran perjalanan maka lokasi seminar diadakan di daerah masing-masing peserta (setiap daerah terdiri dari maksimal 10 peserta diklat), kecuali peserta dari BPS Pusat dan sekitarnya diadakan di Pusdiklat BPS. Optimalisasi anggaran digunakan untuk kegiatan diklat lain terutama diklat teknis yang sangat diperlukan dalam rangka menunjang kinerja dan kualitas pegawai BPS.
3. Hasil pengukuran yang dilakukan Kementerian Keuangan melalui Sistem Aplikasi SMART terhadap rata-rata efisiensi untuk setiap jenis *output* memberikan nilai 16,11 persen. Hal tersebut menunjukkan adanya efisiensi terhadap tercapainya target *output* bila dibandingkan dengan realisasi anggaran.
4. Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2017 dari total pagu anggaran sebanyak Rp 63.783,52 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 53.531,46 juta atau sekitar 83,93 persen. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja tujuan sebesar 96,88 persen dan capaian kinerja sasaran sebesar 95,43 persen, dapat dikatakan Pusdiklat BPS telah melakukan efisiensi penggunaan anggaran meskipun belum maksimal.

3.6. Realisasi Anggaran Tahun 2017

Selain dari sisi SDM, keberhasilan pencapaian kinerja sangat didukung oleh anggaran yang tersedia di Pusdiklat BPS. Dukungan dana tersebut diwujudkan melalui 2 (dua) program, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas teknis Lainnya (DMPTTL), dan (2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA). Keberhasilan/kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab Kepala Pusdiklat BPS beserta jajarannya atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan.

Dari sisi anggaran, untuk mencapai kinerja yang diharapkan pada tahun 2017 dialokasikan pagu anggaran sebanyak Rp 63.783,52 juta. Pagu anggaran tersebut terdiri dari Program DMPTTL sebesar Rp 59.836,76 juta yang terdiri dari Rp 58.104,08 juta berasal dari rupiah murni dan Rp 1.732,68 juta berasal dari PNBP, serta Program PSPA sebanyak Rp 3.946,76 juta. Rincian Pagu anggaran Pusdiklat BPS tahun 2017 menurut program dan sumber dana dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pagu Anggaran Pusdiklat BPS Menurut Program dan Sumber Dana Tahun Anggaran 2017 (Juta rupiah)

Program / Sumber Dana	Rupiah Murni	PNBP	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
01 DMPTTL	58.104,08	1.732,68	59.836,76
02 PSPA	3.946,76	-	3.946,76
Total	62.050,84	1.732,68	63.783,52

Dari Tabel 10 dapat dilihat pula bahwa Program DMPTTL memberikan kontribusi terbesar terhadap pagu anggaran Pusdiklat BPS

yaitu sebesar 93,81 persen dan sisanya adalah Program PSPA sebesar 6,19 persen.

Dari total pagu anggaran sebanyak Rp 63.783,52 juta direalisasikan anggaran sebanyak Rp 53.531,46 juta atau sekitar 83,93 persen, seperti yang dapat dilihat pada Tabel 11.

1. Program DMPTTL

Pada Program DMPTTL terdapat 2 (dua) output yaitu Layanan Pendidikan dan Pelatihan serta Layanan Perkantoran.

1a. Layanan Pendidikan dan Pelatihan

Untuk output Layanan Pendidikan dan Pelatihan direalisasikan anggaran sebesar 85,06 persen yaitu Rp 37.859,55 juta dari pagu anggaran Rp 44.509,52 juta. Pada output tersebut terdapat 4 (empat) komponen yang masing-masing telah direalisasikan anggarannya. Komponen Pendidikan dan Latihan Aparatur dan Rintisan Pendidikan Gelar direalisasikan anggaran sebesar 94,88 persen. Kontribusi terbesar pada komponen ini adalah sub komponen Rintisan Gelar yaitu sebesar 96,56 persen. Pada Rintisan Gelar telah direalisasikan anggaran untuk keperluan peserta tugas belajar berupa uang bantuan biaya hidup, uang buku dan referensi, bantuan riset/penelitian/seminar, dan biaya pendidikan ke masing-masing perguruan tinggi. Selain itu, terdapat pula biaya perjalanan pemanggilan/pemulangan peserta tugas belajar dan perjalanan dalam rangka kerjasama perguruan tinggi.

Pada komponen Pendidikan dan Latihan Prajabatan dan Kepemimpinan direalisasikan anggaran sebesar 82,38 persen. Anggaran terbesar terdapat pada subkomponen Pelatihan Dasar Calon PNS Golongan III yang terdiri dari 453 peserta diklat (12 angkatan) dan telah terealisasi sebesar 90,21 persen. Pada komponen tersebut terdapat

subkomponen Jasa Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan (PNBP) dengan pagu anggaran Rp. 901,01 juta namun realisasinya 0 persen. Hal ini terjadi karena keterbatasan kelas dan kamar asrama serta jadwal diklat yang padat sehingga tidak dapat menerima peserta dari instansi luar.

Sementara itu, pada komponen Pendidikan dan Latihan Teknis terdapat beberapa subkomponen kegiatan diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS. Daya serapnya kurang memuaskan sehingga hanya terealisasi 55,57 persen. Sedangkan untuk komponen Standardisasi dan Sertifikasi menyerap anggaran sebesar 80,49 persen yang berasal dari subkomponen Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa yang pada tahun 2017 diselenggarakan sebanyak 4 angkatan.

1b. Layanan Perkantoran

Penyerapan anggaran pada output Layanan Perkantoran adalah sebesar 78,91 persen yaitu Rp 12.095,31 juta dari pagu anggaran Rp 15.327,24 juta, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai berupa komponen Gaji dan Tunjangan dengan realisasi sebesar 84,34 persen.

Sementara itu, untuk belanja barang terdapat pada komponen Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran dengan realisasi sebesar 66,67 persen.

2. Program PSPA

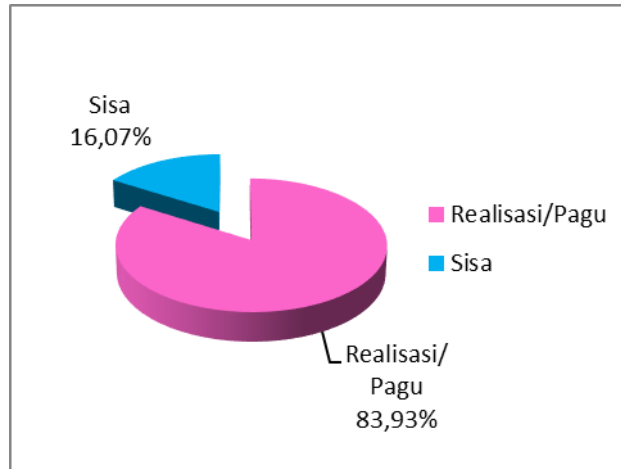
Sementara itu, pada Program PSPA yaitu output Layanan Internal direalisasikan sebesar 90,62 persen, yaitu Rp 3.576,60 juta dari pagu anggaran Rp 3.946,76 juta berupa belanja modal terdiri dari belanja peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta pengadaan perangkat pengolahan data dan komunikasi.

Tabel 11. Realisasi Anggaran Pusdiklat BPS Tahun Anggaran 2017 (Juta Rupiah)

Kode	Uraian	Pagu Anggaran 2017 (Juta rupiah)	Realisasi Anggaran 2017 (Juta rupiah)	Realisasi/Pagu (%)
	DMP TTL + PSPA	63.783,52	53.531,46	83,93
054.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS	59.836,76	49.954,85	83,49
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	59.836,76	49.954,85	83,49
2887.966	Layanan Pendidikan dan Pelatihan [Base Line]	44.509,52	37.859,55	85,06
601	PENDIDIKAN DAN LATIHAN APARATUR DAN RINTISAN PENDIDIKAN GELAR	17.478,26	16.583,09	94,88
A	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR NEGARA	1.035,27	705,32	68,13
B	RINTISAN PENDIDIKAN GELAR	16.442,99	15.877,77	96,56
631	PENDIDIKAN DAN LATIHAN PRAJABATAN DAN KEPEMIMPINAN	21.287,86	17.537,61	82,38
A	PELATIHAN DASAR CALON PNS GOL III	11.964,14	10.792,47	90,21
B	DIKLATPIM TINGKAT IV	6.475,18	5.070,28	78,30
C	DIKLATPIM TINGKAT III	1.316,18	1.151,85	87,51
D	DIKLATPIM II	604,11	498,04	82,44
E	JASA PENYELENGGARAAN DIKLAT KEPEMIMPINAN DAN PRAJABATAN (PNBP)	901,01	0,00	0,00
F	DIKLATPIM I	27,24	24,97	91,67
661	PENDIDIKAN DAN LATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL	3.547,24	1.971,26	55,57
A	DIKLAT TEKNIS SUBSTANSI STATISTIK	129,69	129,69	100,00
C	DIKLAT FUNGSIONAL STATISTISI TINGKAT AHLI	1.117,22	758,05	67,85
D	DIKLAT FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI	887,37	418,86	47,20
G	JASA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS DAN FUNGSIONAL (PNBP)	831,67	148,60	17,87
I	TOT SUBSTANSI DIKLATPIM TK. III DAN IV	177,95	128,56	72,24
K	DIKLAT PENGUATAN KOMPETENSI SDM ULP BPS	403,34	387,50	96,07
674	STANDARDISASI DAN SERTIFIKASI	2.196,17	1.767,59	80,49
A	DIKLAT KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	2.196,17	1.767,59	80,49

2887.994	Layanan Perkantoran [Base Line]	15.327,24	12.095,31	78,91
001	Gaji dan Tunjangan	10.618,52	8.956,07	84,34
A	Penbayaran Gaji dan Tunjangan	10.618,52	8.956,07	84,34
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	4.708,72	3.139,23	66,67
A	PEMERIKSAAN KESEHATAN, EXTRA FOODING, POLIKLINIK DAN OBAT-OBATAN	256,19	123,16	48,07
B	PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG KANTOR DAN HALAMAN KANTOR	932,76	561,99	60,25
C	PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR RODA 4/6/10 DAN RODA 2	327,74	102,09	31,15
D	PERAWATAN/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR	681,23	396,56	58,21
E	OPERASIONAL PERKANTORAN DAN PIMPINAN	2.169,26	1.696,29	78,20
F	PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN	272,92	232,32	85,13
G	PENGADAAN TOGA/PAKAIAN KERJA SOPIR/PESURUH/PERAWAT/DOKTER/SATPA M/TENAGA TEKNIS LAINNYA	68,62	26,81	39,07
054.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS	3.946,76	3.576,60	90,62
2890	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	3.946,76	3.576,60	90,62
2890.951	Layanan Internal (Over Head)	3.946,76	3.576,60	90,62
007	Peralatan dan Mesin	637,05	600,26	94,23
A	Pengadaan Sarana Perkantoran	635,12	600,26	94,51
C	Pengadaan Meubelair	1,93	0,00	0,00
008	Gedung dan Bangunan	2.358,62	2.049,82	86,91
F	Rehabilitasi dan Penambahan Nilai Bangunan Gedung Kantor	2.358,62	2.049,82	86,91
052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	951,09	926,52	97,42
A	Pengadaan Perangkat Teknologi dan Komunikasi	851,17	828,12	97,29
B	Pengadaan Peralatan Komunikasi	99,92	98,40	98,47

Sebagai gambaran realisasi dan sisa anggaran Pusdiklat BPS tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 31.



Gambar 31. Grafik Penyerapan Anggaran Pusdiklat BPS Tahun 2017

BAB IV

PENUTUP



PENUTUP

4.1. Tinjauan Umum

Seiring dengan tuntutan BPS untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas serta pelayanan yang prima kepada pengguna data, Pusdiklat BPS juga dihadapi tantangan untuk menyediakan SDM yang lebih berkualitas melalui peningkatan layanan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang dibutuhkan BPS.

Untuk memenuhi tantangan yang dihadapi dan mempermudah pencapaiannya, Pusdiklat BPS menyusun satu tujuan capaian kinerja, dua sasaran strategis dan tujuh indikator kinerja yang harus dicapai pada tahun 2017. Tujuan capaian kinerja yang telah dicapai Pusdiklat BPS pada tahun 2017 adalah terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima. Sedangkan sasaran strategis yang telah dicapai adalah (i) meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima dan (ii) meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan.

Capaian kinerja tujuan Pusdiklat BPS pada tahun 2017 adalah sebesar 96,88 persen. Angka ini menunjukkan bahwa kinerja Pusdiklat BPS pada tahun 2017 dapat dikatakan cukup memuaskan meskipun belum sepenuhnya karena belum mencapai 100 persen. Begitu pula dengan kedua sasaran strategis, bila dilihat rata-ratanya menunjukkan angka dibawah 100 yaitu 95,43 persen.

Meskipun secara umum kinerja Pusdiklat BPS belum mencapai 100 persen, namun bila dilihat dari sisi peserta diklat hasilnya sangat memuaskan dimana capaiannya telah melebihi target. Hal ini terbukti dari angka capaian kinerja pada indikator "Persentase peserta Diklat

Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan” yaitu sebesar 107,61 persen dan “Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik” sebesar 102,63 persen.

Tingkat capaian kinerja yang telah dicapai mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pusdiklat BPS telah sesuai program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dan sekaligus telah mampu memenuhi visi dan misi Pusdiklat BPS.

Disisi lain masih terdapat beberapa kekurangan terkait tidak tercapainya target beberapa IKU. Untuk mencapai target yang diinginkan tentunya hal ini perlu tindak lanjut sehingga diharapkan pencapaian pada tahun depan dapat ditingkatkan. Peningkatan bukan saja berupa bertambahnya realisasi kinerja namun dapat berupa penajaman indikator maupun target kinerja sehingga pengukuran terhadap tujuan dan sasaran strategis meningkat baik secara kualitas maupun relevansinya.

4.2. Tindak Lanjut

Pada tahun 2017, terdapat dua indikator yang capaian kerjanya kurang dari 100 persen. Untuk indikator berikut masih dapat dikatakan cukup memuaskan karena capaian kerjanya sudah lebih dari 90 persen, yaitu indikator Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat (96,88 %). Namun hal ini perlu tetap menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti agar tahun-tahun berikutnya dapat menghasilkan kinerja yang lebih memuaskan. Salah satu faktor adalah dengan meningkatkan realisasi capaian kinerja indikator tersebut. Hal ini dapat dilakukan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antara pihak penyelenggara dalam hal ini pimpinan/struktural, widyaiswara/pengajar, dan seluruh pegawai Pusdiklat BPS untuk meningkatkan kinerja masing-

masing sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat.

Sementara itu, indikator berikut capaian kinerjanya kurang dari 90 persen yaitu jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS dengan capaian sebesar 60,50 persen. Indikator tersebut menghasilkan capaian lebih kecil dibandingkan target Renstra tahun 2017 dan 2019. Hal ini perlu digali informasi lebih dalam lagi apakah perlu melakukan revisi terhadap target indikator tersebut atau mencari solusi untuk dapat meningkatkan capaian kinerja. Penggalan lebih dalam lagi perlu dilakukan terutama pada proses perencanaan kegiatan tahun 2018, agar target yang ditentukan tidak terlalu tinggi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Pusdiklat BPS, tindak lanjut tidak hanya dilakukan terhadap indikator yang capaiannya kurang dari 90 persen, namun perlu juga dilakukan penajaman terhadap beberapa indikator/IKU sehingga pengukuran keberhasilan sasaran Pusdiklat BPS menjadi lebih relevan. Penajaman IKU bukanlah hal yang mudah mengingat penajaman memerlukan kesiapan, baik dari sisi SDM maupun anggaran yang harus dipenuhi agar IKU yang telah disusun bukan saja dapat diukur tetapi juga dapat dicapai keberhasilannya.

Beberapa indikator sasaran yang perlu dipertajam terkait dengan:

1. Kategori kelulusan Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan: Pengukuran kategori kelulusan peserta diklat perlu dikaji ulang agar memperoleh indikator yang dapat mencerminkan keberhasilan Pusdiklat BPS dalam menyelenggarakan diklat. Penentuan kelulusan peserta berdasarkan penilaian terhadap aspek sikap, perilaku, disiplin, dan akademis. Adanya pola baru pada diklatpim dan prajabatan, untuk nilai akademis selain penilaian ujian di dalam kelas, juga berdasarkan penyusunan kertas kerja

aktualisasi bagi peserta diklat prajabatan dan proyek perubahan bagi peserta diklatpim. Hasil penyusunan kertas kerja tersebut diseminarkan baik pada saat rancangan maupun evaluasi akhir. Seminar evaluasi akhir dilakukan setelah dua bulan *off campus* sehingga penentuan kelulusan tidak dapat dilakukan segera setelah diklat selesai. Hal ini berpengaruh terhadap pengukuran capaian kinerja triwulanan karena persentase kelulusan diperoleh setelah selesai seminar. Jika sebelumnya indikator yang dihitung adalah persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan, maka untuk kedepannya dapat ditambah dengan manfaat yang dirasakan/diperoleh dari hasil Diklat dan Realisasi dari Komitmen Tindak Lanjut bagi peserta Diklatpim dan Rencana Aksi bagi peserta Diklat Prajabatan.

2. Surat Izin Belajar: Perlu perubahan indikator dalam rangka mengukur keberhasilan pengelolaan izin belajar. Bukan hanya dilihat dari persentase Surat izin Belajar yang diselesaikan, melainkan juga dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan seperti penyelesaian proses izin belajar yang tepat waktu. Dengan demikian capaian indikator akan lebih berkualitas.
3. Tugas Belajar yang dibiayai BPS: Seperti halnya pada indikator penyelesaian surat izin belajar, perlu perubahan pula indikator dalam rangka mengukur keberhasilan penyelenggaraan tugas belajar. Jika sebelumnya hanya dihitung jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS, maka kedepan harus dilihat dari sisi *outcome* yang dihasilkan.
4. Dalam rangka meningkatkan kinerja widyaiswara sebagai ujung tombak pengajar diklat, perlu dimasukkan indikator yang dapat menunjang sasaran strategis meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima.

LAMPIRAN

1. Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Satuan Kerja: Pusdiklat BPS						
	SS.1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan					
	1.1. Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90%	91%	92%	93%	94%
	1.2. Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	90%	91%	92%	93%	94%
	1.3. Persentase Kepuasan Peserta Diklat terhadap Penyelenggaraan Diklat	90%	92%	94%	95%	96%
	1.4. Persentase Surat Izin Belajar yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	1.5. Jumlah Pegawai yang Mengikuti Tugas Belajar yang Dibiayai BPS	242	265	280	320	324
	SS.2. Terwujudnya Pengelolaan Aset BMN dan Akuntabilitas Kinerja yang Transparan					
	2.1. Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

2. Reviu Renstra Pusdiklat BPS 2015-2019

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS/ INDIKATOR	TARGET KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
T. Terwujudnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima	Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	-	-	94 %	95 %	96 %
	SS.1. Meningkatnya layanan pendidikan dan pelatihan aparatur BPS yang prima					
	IKSS 1.1. Persentase peserta diklat prajabatan dan kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	IKSS 1.2. Persentase peserta diklat teknis dan fungsional yang lulus dengan kategori baik	90 %	91 %	92 %	93 %	94 %
	IKSS 1.3. Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	-	-	80 %	80 %	80 %
	IKSS 1.4. Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	90 %	92 %	94 %	95 %	96 %
	IKSS 1.5. Persentase surat izin belajar yang diselesaikan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	IKSS 1.6. Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	242	265	280	320	324
	SS.2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan					
	IKSS 2.1. Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	67	70	72	74	75

3. Pernyataan Perjanjian Kinerja Pusdiklat BPS 2017

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Razali Ritonga, M.A.
Jabatan : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Selanjutnya disebut pihak pertama

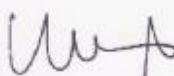
Nama : Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
Jabatan : Sekretaris Utama
Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua


Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

Jakarta, 27 Maret 2017
Pihak Pertama

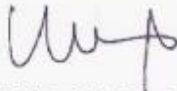

Drs. Razali Ritonga, M.A.
NIP. 19580414 198103 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Tujuan/Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Satuan (3)	Target (4)
Tujuan 1. Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33
Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima	Persentase Peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00
	Persentase Peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00
	Persentase Peserta Diklat pengadaan Barang dan Jasa yang lulus	Persen	80,00
	Persentase Kepuasan Peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33
	Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00
	Jumlah Pegawai yang mengikuti Tugas Belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	200
Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan	Hasil Penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70

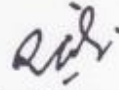
Kegiatan	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	Rp. 61.252.631.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPS serta Operasional Perkantoran Lainnya	Rp. 3.946.757.000,-
Jumlah	Rp. 65.199.388.000,-

Pihak Kedua



Dr. Dedi Walujadi, S.E., M.A.
NIP. 19570923 198003 1 003

Jakarta, 27 Maret 2017
Pihak Pertama



Drs. Razali Ritonga, M.A.
NIP. 19580414 198103 1 002

4. Pengukuran Capaian Kinerja 2017

Tujuan/Sasaran Strategis/Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
(2)		(4)	(3)	(4)
T: Terwujudnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33	96,88	96,88
SS1: Meningkatnya Layanan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur BPS yang Prima				
Persentase peserta Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan yang lulus dengan kategori memuaskan	Persen	92,00	99,00	107,61
Persentase peserta Diklat Teknis dan Fungsional yang lulus dengan kategori baik	Persen	95,00	97,50	102,63
Persentase Peserta Diklat Pengadaan Barang dan Jasa yang Lulus	Persen	80,00	80,00	100,00
Persentase kepuasan peserta diklat terhadap penyelenggaraan diklat	Persen	92,33	89,45	96,88
Persentase Surat Ijin Belajar yang diselesaikan	Persen	100,00	100,00	100,00
Jumlah pegawai yang mengikuti tugas belajar yang dibiayai BPS	Pegawai	200	121	60,50
SS2: Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang transparan				
Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat	Poin	70	70,27	100,39
Rata-rata Capaian Indikator Sasaran				95,43

5. Jumlah Pegawai Di Lingkungan Pusdiklat BPS Menurut Jenis Jabatan Satuan Organisasi Tahun 2017

No.	Unit Organisasi	Jenis Jabatan					Jumlah
		Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Fungsional	Staf	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Kepala Pusdiklat	1	-	-	-	-	1
2.	Bagian Tata Usaha	-	1	2	-	27	30
3.	Bidang Diklat Prajabatan dan Kepemimpinan	-	1	2	-	9	12
4.	Bidang Diklat Teknis dan Fungsional	-	1	2	-	7	10
5.	Widyaiswara	-	-	-	21	-	21
Jumlah		1	3	6	21	43	74

6. Jumlah Pejabat Fungsional pada Pusdiklat BPS Keadaan Akhir Tahun 2017

Jabatan Fungsional	Ahli				Total
	Pertama	Muda	Madya	Utama	
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(11)
Widyaiswara	-	11	10	-	21
Jumlah	-	11	10	-	21

7. Rintisan Pendidikan Gelar Pusdiklat BPS Tahun 2017

Kerjasama Kegiatan Pusdiklat Tahun 2017

No.	Kegiatan *)	Lembaga/Instansi	Data/Output yang dihasilkan	Peserta Tugas Belajar		
				Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pendidikan S2						
1.	Pendidikan Program Studi Magister (S2) Informatika Angkatan IV	Sekolah Teknik Elektro dan Informatika Institut Teknologi Bandung (ITB)	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	2	8
2.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Angkatan IX	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	5	7
3.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika Angkatan V	Universitas Padjadjaran	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	3	5
4.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ketenagakerjaan Angkatan V	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	2	12	14
5.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	6	8	14
6.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	6	10
7.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	5	10
8.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Airlangga	Sumber Daya Manusia (SDM)	5	6	11
9.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	10	9	19
10.	Pendidikan Program Magister (S2) Program Studi Kependudukan	Universitas Gadjah Mada	Sumber Daya Manusia (SDM)	4	14	18
Pendidikan S3						
11.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Ilmu Ekonomi	Universitas Indonesia	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	3	4
12.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	0	1
13.	Pendidikan Program Doktor (S3) Program Studi Statistika	Institut Pertanian Bogor	Sumber Daya Manusia (SDM)	1	1	2
Total				49	74	123

Catatan: *) Sistem kerjasama dilakukan dengan swakelola (BPS sebagai pemberi Swakelola/pertanggungjawaban anggaran di BPS)

8. Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat BPS Tahun 2017

Diklat yang Diselenggarakan oleh Pusdiklat Tahun 2017

No.	Nama Diklat	Jumlah Angkatan	Jumlah Peserta			Asal Peserta (BPS/Non BPS)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Diklat Prajabatan						
1.	Pelatihan Dasar CPNS Gol I dan II	-	-	-	-	-
2.	Pelatihan Dasar CPNS Gol III	12	197	239	436	BPS
Diklat Kepemimpinan						
1	Diklatpim III	1	32	2	34	BPS
2	Diklatpim IV	5	99	68	167	BPS
Total DPK		18	328	309	637	
Diklat Fungsional						
1.	Diklat Fungsional Statistisi Tingkat Ahli	2	32	16	48	BPS dan Non BPS
2.	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli	1	15	1	16	Non BPS
3	Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil PNBP	1	9	3	12	Non BPS
Diklat Teknis						
1	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi, Kerjasama dengan LKPP	8	163	100	263	BPS
2	Diklat Teknis Penguatan Unit Layanan Pengadaan	2	42	28	70	BPS
3	Diklat Kewidyaiswaraan Substansi Diklatpim Tingkat III dan Tingkat IV	1	22	7	29	BPS dan Non BPS
Total DTF		15	283	155	438	
Total			611	464	1.075	

9. Kalender Diklat Tahun 2017

KALENDER TENTATIF DIKLAT TAHUN 2017

NAMA DIKLAT	TANGGAL	PM	APM	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	DPK											
																JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER
I. PRALUJATAN																											
1. Goo III Angkutan 117	12 Mar - 22 Apr 25 Apr - 11 Agt 1418 Agt	ByarH	ByarH																								
2. Goo III Angkutan 118	12 Mar - 22 Apr 25 Apr - 11 Agt 1418 Agt	Subrum	Subrum																								
3. Goo III Angkutan 118	2 Apr - 13 Mei 15 Mei - 31 Agt 57 Sep	Windy P8	Windy P8																								
4. Goo III Angkutan 120	2 Apr - 13 Mei 15 Mei - 31 Agt 57 Sep	Hevda	Hevda																								
5. Goo III Angkutan 121	1 Mei - 10 Jun 12 Jun - 29 Sep 26 Okt	ByarH	Subrum																								
6. Goo III Angkutan 122	1 Mei - 10 Jun 12 Jun - 29 Sep 26 Okt	ByarH	Subrum																								
7. Goo III Angkutan 123	1 Mei - 10 Jun 12 Jun - 29 Sep 26 Okt	Windy P8	Windy P8																								
8. Goo III Angkutan 124	14 Mei - 20 Jun 21 Jun - 13 Okt 1819 Okt	Windy P8	Windy P8																								
9. Goo III Angkutan 125	9 Jul - 19 Agt 27 Agt - 8 Des 1114 Des	ByarH	ByarH																								
10. Goo III Angkutan 126	8 Jul - 19 Agt 27 Agt - 8 Des 1114 Des	Subrum	Subrum																								
11. Goo III Angkutan 127	18 Jul - 29 Agt 29 Agt - 16 Des 1821 Des	Windy P8	Tha																								
12. Goo III Angkutan 128	18 Jul - 29 Agt 29 Agt - 16 Des 1821 Des	Lin	Lin																								
II. KEPEREMPUAN																											
1. Pm IV Angkutan 87	22 Jun - 8 Mar 8 Mar - 6 Mei 8 - 12 Mei	Windy P8	Hevda																								
2. Pm IV Angkutan 88	29 Jun - 15 Mar 15 Mar - 12 Mei 15 - 19 Mei	ByarH	Maril																								
3. Pm IV Angkutan 88 (PNSP)	18 Feb - 1 Apr 3 Apr - 2 Jun 6 - 8 Jun	Windy P8	Popud																								
4. Pm IV Angkutan 100	20 Agt - 6 Okt 8 Okt - 30 Nov 4 - 8 Des	ByarH	Lin																								
5. Pm IV Angkutan 101	27 Agt - 12 Okt 13 Okt - 3 Des 11 - 15 Des	Tha	Tha																								
6. Pm IV Angkutan 102	3 Sep - 19 Okt 20 Okt - 15 Des 18 - 22 Des	ByarH	Hevda																								
7. Pm IV Angkutan 103	10 Sep - 26 Okt 27 Okt - 22 Des 27 - 30 Des	Windy P8	Maril																								
1. Pm III Angkutan 94	18 Jan - 26 Feb 27 Feb - 21 Apr 25 - 29 Apr	ByarH	Tha																								
DTT																											
1. Stabilitas Ahli BP3 2 Angk	18 Jan - 17 Feb 30 Okt - 28 Nov		Soekarno																								
2. Prakon Ahli BP3 1 Angk	1 - 30 Nov																										
3. PNSP Prakon Ahli (20 laur)	10 Okt - 8 Nov																										
4. Bacor (3 kelas)	27 Feb - 4 Mar 20 - 26 Mar 10 - 16 Jul																										
5. Training Sampling UNJAP	18 - 28 Okt																										
6. Diast Teknis Statistik	12 - 17 Jun																										
7. Diast Teknis Komputer	21 - 26 Agt																										
8. Analis Keperawatan	18 - 25 Nov																										
Total				136	108	108	134	148	108	148	148	140	136	160	88	25											

Keterangan:

- Liur Hari Raya Idul Fitri 1438 H
- Berhormat
- Seminar Proposal
- Breakthrough
- Seminar di daerah